Rikayani dan Endang Abdullah

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas 5

Rikayani
Endang Abdullah

BUKU SEKOLAH bse ELEKTRONIK

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## SD/MI



5

Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

Rikayani
Endang Abdullah

# Pendidikan Kewarganegaraan 5

Untuk Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah

Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

# Pendidikan Kewarganegaraan 5

## Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

**Penulis Naskah** : **Rikayani**
**Endang Abdullah**

Ilustrasi Kulit dan Isi : Budi S.R
Ukuran Buku : 17.5 X 25 cm

372.8
RIK RIKAYANI
p Pendidikan Kewarganegaraan 5: Untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah kelas 5, penulis, Rikayani, Endang Abdullah ; ilustrator, Budi S.R
. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 104 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 104
Indeks
ISBN 978-979-068-625-0 (nomor jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-643-4

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
2. Pendidikan Moral Pancasila-Pendidikan Dasar
I. Judul II. Endang Abdullah III. Budi S.R



Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009

Diperbanyak oleh ....

# Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009

Kepala Pusat Perbukuan

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menerbitkan buku Pendidikan Kewarga Negaran untuk Sekolah Dasar kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini telah berhasil di rampungkan.

Pendekatan dan penyajian dalam buku ini pada dasarnya mengarahkan kepada pembentukan pribadi siswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, cerdas, bertangung jawab cinta lingkungan, dan demokratis.

Untuk itu kegitan siswa lebih diarahkan pada kemampuan untuk mengenal dan memahami nilai moral, norma sosial, budaya, dan agama yang sesuai dengan idiologi pancasila. Sehingga siswa mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Penulis berharap buku ini dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam pembentukan karekter siswa dan dapat memberikan kemudahan bagi guru dalam mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan kurikulum dan tujuan pendidikan.

Harapan kami semoga buku pendidikan Kewarganegaraan PPKN untuk SD ini dapat dijadikan tolak ukur dalam memberikan dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti dalam diri peserta didik para siswa. Dan juga dapat meningkatkan efektifitas belajar sebagai sarana untuk menembangkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis sesuai dengan nilai luhur moral Pancasila.

**Penulis**

# Daftar Isi


Kata Sambutan ........................................................................ iii
Kata Pengantar ....................................................................... iv
Daftar Isi ................................................................................ v

Bab 1 Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .... 1
A. Negara Kesatuan Republik Indonesia ............................ 2
B. Keutuhan Negara Republik Indonesia ............................ 15
C. Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia .......................................... 21
Rangkuman ........................................................................ 26
Uji Kompetisi........................................................................ 27

Bab 2 Peraturan Perundang-undangan di Indonesia......... 33
A. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia................ 34
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan........... 34
2. Manfaat Peraturan Perundang-undangan ............... 36
B. Contoh-contoh Peraturan Perundangan di Indonesia .... 37
1. Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.............................. 37
2. Contoh Peraturan Perundangan di Tingkat Pusat .... 41
3. Contoh Peraturan Perundangan di Tingkat Daerah.... 42
Rangkuman ........................................................................ 48
Uji Kompetisi........................................................................ 49
Uji Kompetensi Semester 1 ................................................ 53

Bab 3 Kebebasan Berorganisasi........................................... 57
A. Pengertian Organisasi ..................................................... 58
1. Mengenal Organisasi.................................................. 58

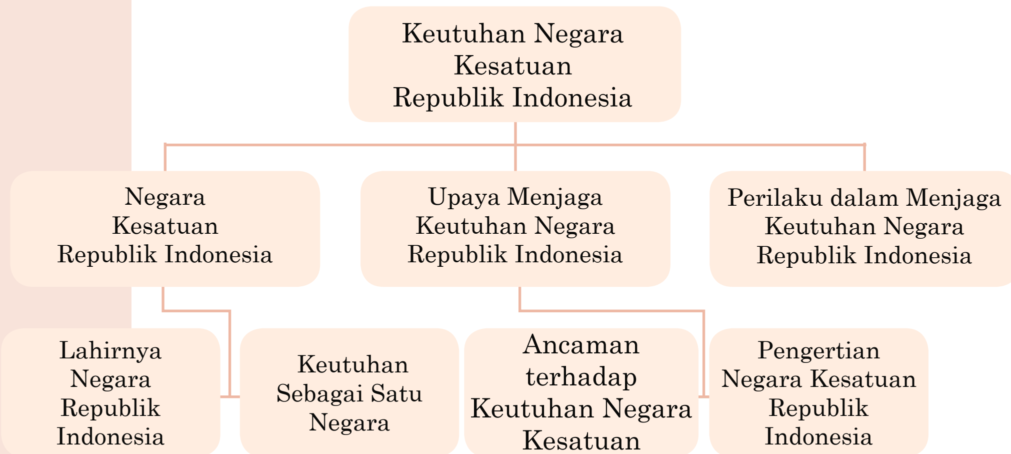
2. Dasar Hukum Organisasi ........................................ 59
B. Contoh-contoh Organisasi ............................................ 62
1. Contoh Organisasi di Lingkungan Sekolah .............. 62
2. Contoh Organisasi di Lingkungan Masyarakat ....... 65
C. Peran Serta Dalam Memilih Organisasi Di Sekolah ...... 66
Rangkuman ........................................................................ 70
Uji Kompetisi........................................................................ 71

Bab 4 Sikap Menghargai Keputusan Bersama ................... 75
A. Keputusan Bersama....................................................... 76
1. Pengertian Keputusan Bersama .............................. 76
2. Bentuk-bentuk Keputusan Bersama........................ 77
B. Sikap Dalam Mematuhi Keputusan Bersama................ 78
Rangkuman ........................................................................ 82
Uji Kompetisi........................................................................ 83
Uji Kompetensi Semester 2 ................................................. 86

Glosarium ............................................................................. 101
Indeks .................................................................................. 102
Daftar Pustaka...................................................................... 104

# Bab 1 Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Peta Konsep




## Kompetensi Dasar

1. Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Kata Kunci

- Negara
- Republik
- Pemerintah
- Kemerdekaan
- Indonesia
- Kesatuan
- Bangsa
- Warga Negara
- Keutuhan
- Rakyat
- Wilayah

Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kesatuan. Berbeda dengan negara lain seperti Amerika Serikat yang menganut negara federal. Sayangnya, perjuangan para pahlawan dulu dalam memerdekakan dan menyatukan negara ini kurang dihargai oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Pergerakan *separatisme* muncul di beberapa daerah yang kurang mendapat perhatian pemerintah atau ketidakadilan pemerintah pusat. Untuk itu sebagai generasi muda bangsa, kita harus mengetahui seluk beluk negara kesatuan Republik Indonesia sehingga kita dapat mencontoh perilaku dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini.

# A. Negara Kesatuan Republik Indonesia

## 1. Paparan Mengenai Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

**Hari Merdeka**

Ciptaan : Ibu Sud

17 Agustus Tahun 45, Itulah Hari Kemerdekaan Kita

Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa

Hari Lahirnya Bangsa Indonesia

Merdeka

Sekali Merdeka Tetap Merdeka

Selama Hayat Masih Dikandung Badan

Kita Tetap Setia, Tetap Setia

Mempertahankan Indonesia

Ingatkah kamu cuplikan lagu perjuangan di atas? Ya, seperti yang tertera di lirik lagu tersebut, negara kita baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari kemerdekaan itu juga menandakan hari lahirnya bangsa dan negara Republik Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Ir. Soekarno, beliau pun lalu menjadi presiden pertama Republik Indonesia, dan ditanda-tangani pula oleh Drs. Moh. Hatta, sang wakil presiden kemudian. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pembacaan teks proklamasi tersebut bertempat di kediaman Ir. Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.

Negara Indonesia yang baru berdiri membutuhkan dasar hukum untuk mengatur pemerintahan. Sebelumnya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dididirikan oleh Jepang, penjajah Indonesia di masa itu, telah mengadakan sidang untuk membahas hal ini. Berikut ini penjelasannya:

## a. Era BPUPKI

Badan yang diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 ini ditugaskan untuk mempelajari hal-hal yang dibutuhkan oleh negara yang baru merdeka. Badan ini semula terdiri atas 63 anggota, sudah termasuk ketua dan wakil ketua. Adapun susunan anggota-anggotanya, antara lain:

**1. Ketua: Dr. Radjiman Wediodinigrat**
**2. Wakil Ketua I: Ichibangase (warga negera Jepang)**
**3. Wakil Ketua II: R. Pandji Suroso**

| No | Nama | No | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Soekarno | 22 | Prof. Dr. P.A.H Djajadiningrat |
| 2 | Mr. Mohammad Yamin | 23 | Prof. Mr. Dr. Soepomo |
| 3 | Dr. Kusumah Atmadja | 24 | Prof. Ir. Roosseno |
| 4 | R.A. Pratalykrama | 25 | Mr. R.P. Singgih |
| 5 | R. Aris | 26 | Ny. Maria Ulfah Santosa |
| 6 | K.H.Dewantara | 27 | R.M. Soerjo |
| 7 | Ki Bagus Hadikusumo | 28 | R. Ruslan Wongsokusumo |
| 8 | BPH. Bintara | 39 | Mr. Soesanto Tirtoprodjo |
| 9 | K.H. Abdul Kahar Muzakkir | 30 | Ny. Soenarjo Mangoenpoespito |
| 10 | B.P.H. Puruboyo | 31 | Dr. R. Boentaran |
| 11 | R.A.A Wiranatakusumah | 32 | Liem Koen Hian |
| 12 | Ir. A. Munandar | 33 | Mr. J. Latuharhary |
| 13 | Oei Tjang Tjoei | 34 | Mr. R. Hendromartono |
| 14 | Drs. Moh. Hatta | 35 | R. Soekardjo Wirjopranoto |
| 15 | Oei Tjong Hauw | 36 | H. Ahmad Sanoesi |
| 16 | H. Agus Salim | 37 | A.M. Dasaad |
| 17 | M. Soetardjo | 38 | Mr. Tan Eng Hoa |
| 18 | Kartohadikoesoemo | 39 | Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo |
| 19 | R.M. Margono Djojohadikusumo K.H. Abdul Halim | 40 | R.A.A. Soemitro Kolopaking |
| 20 | K.H. Maskur | 41 | K.R.M.T. Woerjaningrat |
| 21 | R. Soedirman | 42 | Mr. A. Soebardjo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | Prof Dr. Djenal Asikin | 52 | Dr. Soekiman |
| 44 | Abikoesno Tjokrosoejoso | 53 | Mr. Wongsonegoro |
| 45 | Parada Harahap | 54 | R. Otto Iskandardinata |
| 46 | Mr. Sartono | 55 | A. Baswedan |
| 47 | K.H. Mansoer | 56 | Abdul Kadir |
| 48 | K.R.M.A. Sosrodiningrat | 57 | Dr. Samsi |
| 49 | Mr. R. Soewandi | 58 | Mr. A.A. Maramis |
| 50 | K.H. Wachid Hasjim | 69 | Mr. Samsudin |
| 51 | P.F. Dahler | 60 | Mr. Sastromoeljono |

Dalam sidang BPUPKI yang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945, keenampuluh tiga anggota tersebut berdiskusi membicarakan dasar negara apa yang akan dipakai oleh negara Indonesia nantinya. Beberapa orang anggota mengajukan usul mengenai dasar negara, yaitu Moh. Yamin, Prof. Soepomo dan Ir. Soekarno. Usulan Mr. Moh Yamin yang diajukan secara lisan mengemukakan tentang Azas dan Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk yaitu:

- Peri Kebangsaan
- Peri Kemanusiaan
- Peri Ketuhanan
- Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sedangkan usulan tertulisnya antara lain:

- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kebangsaan Persatuan Indonesia
- Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
- dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Setelah Mr. Moh. Yamin dilanjutkan oleh usulan Prof. Dr. Soepomo, dalam sidang 31 Mei 1945, mengenai azas dan dasar negara Indonesia merdeka seperti di bawah ini:

- persatuan atau nasionalisme
- kekeluargaan
- takluk kepada Tuhan
- musyawarah dan keadilan rakyat



Ir. Soekarno



Mr. Moh. Yamin

*Sumber: kepustakaan-presiden.pnri.go.id*

Lalu Ir. Soekarno juga mengajukan usulannya. Dalam pidato pada 1 Juni 1945, ia menyebutkan mengenai kelima sila dasar tersebut. Usulannya sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Pertama | : Kebangsaan Indonesia |
| Kedua | : Internasionalisme atau peri kemanusiaan |
| Ketiga | : Mufakat atau demokrasi |
| Keempat | : Kesejahteraan sosial |
| Kelima | : Ketuhanan yang Berkebudayaan |

Anggota-anggota lainnya menyimak semua pidato mengenai usulan dasar negara tersebut dengan baik.

Pada hari terakhir di sidang yang pertama itu, Dr. Radjiman Wediodiningrat membentuk panitia delapan untuk memeriksa semua usulan lisan dan tertulis. Panitia delapan diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini bekerja ketika BPUPKI sedang reses. Lalu, ketua panitia delapan, Ir. Soekarno mengumpulkan 38 orang anggota BPUPKI untuk membicarakan berbagai masalah mengenai dasar negara tersebut. Setelah itu dibentuk panitia kecil yang berjumlah sembilan orang untuk menuntaskan pembicaraan mengenai dasar negara tersebut. Kesembilan orang tersebut, antara lain:

- Ir. Soekarno
- Drs. Muhammad Hatta
- A.A. Maramis

- K.H. Wahid Hasyim
- K.H. Abdul Kahar Muzakir
- H. Agus Salim
- Abikusno Tjokrosuyoso
- Ahmad Soebardjo
- Mr. Muh. Yamin.

Pada sidang BPUPKI kedua, 10 sampai 17 Juli 1945, panitia sembilan dan ketigapuluh delapan anggota lainnya memberikan hasil kegiatannya selama masa reses. Ketika itu dibentuklah Panitia Perancang Undang-undang Dasar tanggal 10 Juli 1945, dan Ir. Soekarno ditugaskan menjadi pemimpinnya. Panitia Perancang UUD ini bermusyawarah dan menghasilkan persetujuan tentang isi rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta.

Akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945, tugas BPUPKI disepakati selesai. Badan ini pun dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. BPUPKI digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

## b. Era PPKI

PPKI beranggotakan 24 orang yang dianggap mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia di zaman itu. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan didampingi Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Keduapuluh empat nama panitia tersebut adalah:

| No | Nama | No | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Rajiman | 13 | Mas Sutardjo |
| | Wadiodiningrat | | Kartohadikusumo |
| 2 | Mr. Soepomo | 14 | Pangeran Surjohamidjojo |
| 3 | Pangeran Purboyo | 15 | Ki. Bagus Hadikusumo |
| 4 | K.H. Wahid Hasyim | 16 | Mr. Abdul Abbas |
| 5 | Dr. Mohamad Amir | 17 | Dr. G.J.J.S. Ratulangi |
| 6 | Mr. Teuku Mohamad | 18 | Andi Pangeran Petta |
| 7 | Hasan | 19 | Rani |
| 8 | Mr. Latuharhary | 20 | Yap Tjiwan Bing |
| 9 | Mr. I. Gusti Ketut Poedja | 21 | Wiranatakusumah |
| 10 | A.A. Hamidan | 22 | Ki Hajar Dewantoro |
| 11 | Otto Iskandardinata | 23 | Sayuti Melik |
| 12 | Abdul Kadir | 24 | Mr. Iwa Kusumasumantri |
| | Raden Pandji Soeroso | | Mr. Ahmad Soebardjo |

Ketika itu Marsekal Terauchi, seorang panglima Tentara Jepang, adalah orang yang mengesahkan PPKI di Dalat Vietnam, pada tanggal 9 Agustus 1945.

Menurut catatan sejarah, Jepang yang sudah kalah perang akhirnya menyerah pada tentara sekutu. Kekosongan kekuasaan ini menjanjikan harapan bagi Indonesia. Hal ini pulalah yang membuat sekelompok pemuda pejuang kemerdekaan mendesak Soekarno dan Hatta sebagai tokoh bangsa, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah pun mengenang tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan kita.

**Tahukah Kamu?**

**Darimana Asal Nama Pancasila?**

Ir. Soekarno atau Bung Karno adalah orang yang pertama kali memperkenalkan nama Pancasila secara resmi untuk menyebutkan lima dasar negara Indonesia hasil rumusannya, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

Menurutnya, nama itu adalah usulan dari seorang teman yang berprofesi sebagai ahli bahasa

Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan pembahasan untuk menentukan dasar negara Republik Indonesia. Sidang yang diadakan oleh PPKI itu menyepakati bahwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila hasil pengesahan ini telah mengalami perubahan seperti pada sila pertama yang tadinya berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Lihat bagan di bawah ini:

**PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA RI**

| Menurut Piagam Jakarta | Pengesahan Pancasila 18 Agustus |
|---|---|
| 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi<br>2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. | 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.<br>2. Kemanusian yang adil dan beradab<br>3. Persatuan Indonesia. |

| | |
|---|---|
| 3. Persatuan Indonesia.<br>4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.<br>5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. | 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.<br>5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. |

Usaha yang gigih dan jiwa kebersamaan yang dirasakan oleh para bapak bangsa atau founding father itu untuk merumuskan dasar negara telah berhasil. Instrumen penting sebuah bangsa menuju cita-cita bersama sudah ditetapkan.

Selain Pancasila, dasar negara Republik Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 yang tahun-tahun belakangan ini sudah diamandemen oleh wakil-wakil rakyat sebanyak empat kali. Amandemen pertama tanggal 19 Oktober 1999, kedua tanggal 18 Agustus 2000, ketiga tanggal 10 Oktober 2001 dan amandemen terakhir pada tanggal 10 Agustus 2002 lalu.

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah dasar hukum di Indonesia. UUD 1945 memiliki dua bagian, Pembukaan dan Batang Tubuh. Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum perumusan Pancasila. Sedangkan pada Batang Tubuh terdiri dari 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan yang terdiri atas 2 pasal.

**Tahukah Kamu?**

**Apakah Piagam Jakarta Itu?**

Pada tanggal 22 Juni 1945 di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, diadakan rapat yang dihadiri oleh Panitia Sembilan. Mereka berhasil membuat naskah berjudul “Rancangan Mukadimah Hukum Dasar”.

Naskah ini lebih dikenal dengan nama “Jakarta Charter” atau “Piagam Jakarta. Mr. Mohammad Yamin adalah tokoh yang mempopulerkannya dengan nama itu pertama kali.

Sedangkan Panitia Sembilan dibentuk atas dasar inisiatif 38 orang anggota BPUPKI yang diberi tugas untuk mencari dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Panitia ini memang terdiri dari 9 orang.

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak ber-dasar atas kekuasaan belaka. Pemerintah juga berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), bukan bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Menurut UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Sistem pemerintahan pada negara yang berbentuk republik dija-lankan oleh Presiden. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, lembaga negara ini memiliki kekuasaan tertinggi. Majelis inilah yang mengangkat Presiden dan Wakilnya.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di-pilih dari dan oleh rakyat melalui Pemilihan Langsung. Presiden memiliki hak dan juga tanggung jawab. Presiden bertanggung jawab langsung kepada MPR. Ia pun berhak menjalankan pemerintahan dengan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya, mengangkat dan memberhentikan para pembantunya sendiri (para menteri), dan berkonsultasi dengan lembaga tinggi negara lainnya.

Negara kesatuan Republik Indonesia ini semestinya harus selalu disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia. Sebelumnya, bangsa Indonesia telah menempuh perjuangan panjang untuk meraih kemerdekaannya. 350 tahun penjajahan Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang memberikan banyak pelajaran berharga akan arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.



Gambar 1.1: Proklamasi Kemerdekaan
Sumber: google/images

Politik adu domba Belanda yang dipergunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia mampu mematahkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Belanda selalu berhasil membungkam perlawanan para pejuang di berbagai wilayah Indonesia karena ketika itu kita belum bersatu. Perjuangan kemerdekaan masih bersifat kedaerahan. Ketika perjuangan itu diwujudkan dengan saling bersatu padu dan terorganisir maka kemerdekaan bukan sebuah impian belaka. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mampu mewujudkan lahirnya negara merdeka yang telah lama dicita-citakan ini. Oleh karena itulah negara kita yang terdiri dari lautan dan kepulauan serta beragam suku bangsa ini menjadi negara kesatuan.

## 2. Penjelasan Mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bisakah kamu menjelaskan apakah yang dimaksud dengan negara? Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, negara adalah wilayah yang dihuni sekelompok masyararakat berjumlah besar dan mempunyai sistem pemerintahan untuk mengatur masyarakat tersebut. Atau pengertian lain dari negara ialah wilayah yang dihuni dan mempunyai kekuasaan terhadap pemerintahan.

Menurut Prof. Miriam Budihardjo, pakar tata negara, negara adalah organisasi yang terdapat dalam suatu wilayah. Organisasi tersebut dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.

Sedangkan menurut Prof. Mr. Soenarko, negara adalah suatu organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

Suatu organisasi yang memiliki kekuasaan berdaulat dapat disebut sebagai negara apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yang disebut juga sebagai unsur-unsur negara:

### 1. Memiliki penduduk yang menetap.

Para penduduk ini memiliki kediaman dan beraktifitas di negara tersebut, dalam waktu terbatas atau seumur hidup. Penduduk pun bermacam-macam, ada yang disebut penduduk asli atau penduduk pendatang. Penduduk juga bisa digolongkan menjadi mereka yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, atau mereka yang memiliki kewarganegaraan asing.

2. **Memiliki wilayah tertentu.**

Wilayah yang dimiliki oleh negara tersebut harus dapat dibuktikan secara fisik (ada bagian tertentu di permukaan bumi, dapat dilihat). Jadi, jika ada negara yang tidak memiliki wilayah sendiri, maka tidak bisa disebut sebagai negara. Wilayah yang dimiliki oleh suatu negara berbeda tergantung posisinya di bumi. Misalnya ada negara yang memiliki wilayah daratan, ada negara yang memiliki wilayah lautan, dan udara sekaligus (seperti Indonesia). Namun ada pula negara yang hanya memiliki wilayah darat dan udara saja karena terletak di tengah kepulauan.

3. **Memiliki pemerintahan yang berdaulat.**

Di dalam menjalankan aktivitas kenegaraan dibutuhkan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga yang berhak membuat dan melaksanakan peraturan demi ketertiban masyarakat. Pemerintah yang berdaulat berarti lembaga tersebut diakui oleh masyarakat, memiliki wewenang penuh dan mampu menegakkan hukum di negara tersebut. Berdaulat ke luar berarti pemerintahan tersebut sama kedudukannya dan sederajat dengan pemerintahan negara lain sehingga dapat menjalin kerjasama yang baik.

4. **Mendapatkan pengakuan dari negara lain.**

Layaknya manusia, suatu negara juga membutuhkan negara lainnya. Apabila suatu negara tidak diakui oleh negara-negara lainnya, maka negara tersebut akan terisolasi dari pergaulan masyarakat dunia. Pengakuan dari negara lainnya memudahkan negara tersebut menjalin hubungan diplomatik demi keuntungan kedua belah pihak.

**Tahukah Kamu?**

**Empat Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945**

1. Negara Persatuan
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Negara berkedaulatan Rakyat
4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab

Selain itu, setiap negara di dunia pastinya memiliki tujuan untuk mensejahterakan warga negaranya. Cita-cita bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat dan negara yang adil dan sejahtera itu dapat ditelusuri dari empat pokok pikiran yang bisa ditemukan pada pembukaan UUD 1945.

Lalu, apa arti dari negara kesatuan itu? Negara kesatuan adalah negara yang memiliki pemerintahan pusat untuk mengatur keseluruhan wilayahnya. Tidak ada negara bagian di Indonesia. Negara kesatuan ini memiliki satu pemerintahan yang *berdaulat* dan sah.

Di dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945 pada pokok pikiran pertama dijelaskan mengenai negara persatuan sebagai negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pengertian negara persatuan antara lain, negara melindungi segenap bangsa dan *tumpah darah Indonesia*, negara mengatasi segenap *paham golongan* dan *perseorangan*, dan negara menghendaki persatuan melindungi segenap bangsa. Hal ini mewajibkan kepada negara, para penyelenggara negara juga setiap warga negara untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan maupun perseorangan.

Seperti yang kalian ketahui, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, besar dan kecil, terbentang dari Sabang (Nangroe Aceh Darussalam) sampai Merauke (Papua). Karena wilayahnya yang sangat luas dan banyak penduduknya, maka negara kesatuan Indonesia memiliki daerah provinsi yang berbeda.

Berbeda dengan negara federal atau serikat yang setiap negara bagiannya dapat memiliki hukum dasar yang berbeda, negara kesatuan seperti Indonesia tidak membedakan seperti itu. Meski begitu, karena wilayah Indonesia yang sangat luas maka untuk memudahkan pengelolaan negara di wilayah-wilayah seluruh Indonesia dibentuklah pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota negara tidak lepas tangan begitu saja. Namun, pengurusan wilayah atau daerah provinsi tersebut diberikan pada pemerintah daerah dengan sebutan otonomi daerah. Prinsip otonomi ini memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Namun tentu saja daerah-daerah tersebut masih bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 18 mengenai pemerintahan daerah. Indonesia memiliki 33 provinsi. Ketigapuluh tiga provinsi itu adalah:

## Nama-nama Provinsi
## Negara Republik Indonesia

| No | Nama Provinsi | No | Nama Provinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Nangro Aceh Darussalam | 18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 2 | Provinsi Sumatra Utara | 19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 3 | Provinsi Sumatra Barat | 20 | Provinsi Kalimantan Barat |
| 4 | Provinsi Riau | 21 | Provinsi Kalimantan Tengah |
| 5 | Provinsi Kepulauan Riau | 22 | Provinsi Kalimantan Selatan |
| 6 | Provinsi Jambi | 23 | Provinsi Kalimantan Timur |
| 7 | Provinsi Bengkulu | 24 | Provinsi Sulawesi Utara |
| 8 | Provinsi Sumatra Selatan | 25 | Provinsi Gorontalo |
| 9 | Provinsi Bangka Belitung | 26 | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 10 | Provinsi Lampung | 27 | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 11 | Provinsi Banten | 28 | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 12 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 29 | Provinsi Maluku |
| 13 | Provinsi Jawa Barat | 30 | Provinsi Maluku Utara |
| 14 | Provinsi Jawa Tengah | 31 | Provinsi Papua Barat |
| 15 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 32 | Provinsi Papua Tengah |
| 16 | Provinsi Jawa Timur | 33 | Provinsi Papua Timur |
| 17 | Provinsi Bali | | |

Semua provinsi tersebut tersebar di antara lima pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua serta beberapa pulau kecil seperti Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku. Ada pula beberapa pulau kecil lainnya yang masuk ke dalam provinsi tertentu seperti Madura, yang termasuk ke dalam wilayah Jawa Timur. Masing-masing daerah tersebut memiliki pemerintahan otonom tersendiri.

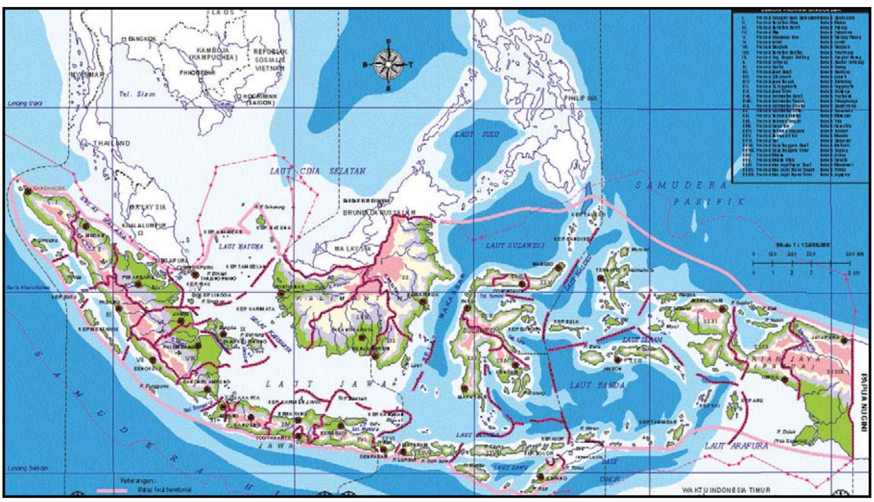
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Bayangkan, luas lautan Indonesia bahkan lebih luas daripada daratan. Indonesia memiliki sebutan lain yaitu nusantara. Nusantara bisa berarti kepulauan. Pulau di Indonesia kira-kira berjumlah 17.508 pulau. Sedangkan pulau yang dihuni kira-kira berjumlah 13.700 pulau.

Luas wilayah Indonesia secara keseluruhan sekitar 5.193.252 km2, dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa lebih. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, tepatnya di Puncak Jaya dengan ketinggian sekitar 5.030 m.

Wilayah daratan Indonesia di pulau Kalimantan berbatasan dengan Malaysia Timur (Serawak), tepatnya di Kalimantan Barat. Terdapat gerbang atau pos perbatasan antara Serawak dan Kalimantan Barat dan ada pula jajaran pegunungan Kapuas Hulu dan Kapuas Hilir sebagai batas alam.

Wilayah daratan Indonesia Timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Selain itu terdapat pula negara Timor Leste di sebelah kanan pulau Nusa Tenggara Timur.

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua. Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia pun berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Batas-batas astronomi Indonesia terletak pada 60 Lintang Utara (LU) – $11^0$ Lintang Selatan (LS) dan $95^0$ Bujur Timur (BT) – $141^0$ BT. Indonesia dikelilingi oleh Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Pasifik di bagian utara, dan Laut India di bagian selatan dan barat.




Gambar 1.2: Peta Wilayah Negara Republik Indonesia
Sumber: google/images

Wilayah laut atau perairan laut Indonesia dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan Konversi Hukum Laut Internasional tahun 1982, yaitu:

1. Batas laut teritorial. Diukur dari 12 mil terluar sebuah pulau ke laut bebas. Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya, juga kekayaan alam yang terdapat di dalamnya.

2. Batas laut kontinen sebuah negara diukur dari jarak paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas. Dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Landasan kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut.
3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau yaitu sejauh 200 mil.

Selain memiliki hak memanfaatkan kekayaan alam di dalam wilayah laut Indonesia, negara kita pun bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi dan melestarikan kekayaan alam tersebut untuk kepentingan bersama.

Sedangkan wilayah udara Indonesia menurut Pasal 30 ayat (c) UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankam, wilayah dirgantara Indonesia terdiri atas ruang udara dan antariksa. Termasuk Geo Stationer (GSO) yang berjarak kurang lebih 36.000 mil km.

## Tugas 1.1



Bentuk kelompok sekitar 6 orang murid di kelasmu. Buatlah replika peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian bisa menggambarnya di kertas gambar berukuran A2 atau kertas karton. Gunakan spidol atau pensil warna yang dapat terlihat jelas. Lalu, tulislah semua yang kalian ketahui mengenai negara kita ini. Tulisan dibuat selayaknya paparan ringkas atau penjelasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# B. Keutuhan Negara Republik Indonesia

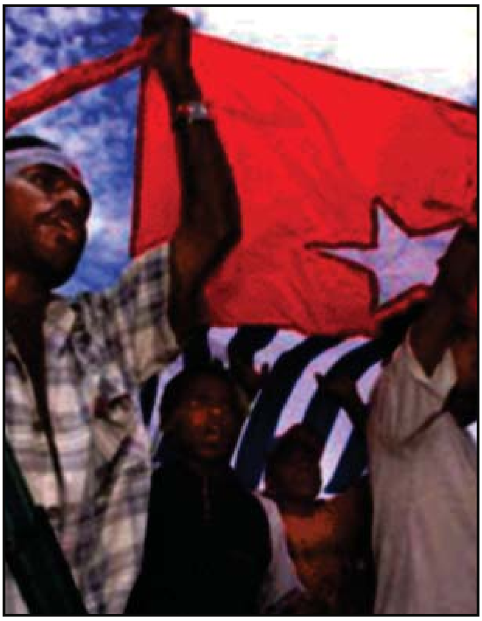
## 1. Ancaman Terhadap Keutuhan Negara Republik Indonesia

Indonesia yang memiliki beberapa gunung berapi masih aktif dikaruniai tanah yang subur. Berbagai macam sumber daya alam melimpah ruah. Minyak bumi, batu bara, gas alam, tanaman dan pepohonan, serta masih banyak yang lainnya. Bahkan 49 % hutan hujan tropis berada di negara kita meski jumlahnya berkurang setiap tahun. Pemerintah telah membuat beberapa taman nasional untuk melindungi tumbuhan juga pepohonan dan kehidupan satwa liar yang semakin terancam. Di sekitar pantai timur Sumatera dan wilayah Kalimantan banyak ditemukan tambang minyak dan gas. Sekitar 80 % persediaan minyak bumi Asia Tenggara disediakan oleh

Indonesia dan 35 % persediaan gas alam dunia didapatkan dari Indonesia. Tembaga di Papua, timah di Bangka dan Belitung, nikel di Sulawesi, batu bara di Sumatera adalah beberapa sumber daya mineral utama di Indonesia. Perak, emas, berlian, dan rubi juga ditemukan di Indonesia dalam jumlah kecil.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi incaran, banyak pihak yang ingin menguasai keka-yaan tersebut demi keserakahan nafsu pribadi atau kelompoknya saja. Pernahkah kamu mendengar pepatah "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh"? Ya, dari pepatah tersebut kita diingatkan untuk selalu bersatu. Dan negara Indonesia yang bersatu tidak akan mudah dikalahkan.

Ancaman terhadap keutuhan negara bisa datang dari luar dan dari dalam. Ancaman yang datang dari luar, misalnya negara lain yang tidak sepaham dengan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Salah satu contohnya, kasus Sipadan dan Ligitan. Malaysia, negara tetangga kita mengklaim bahwa kedua pulau di dekat Kalimantan tersebut adalah milik mereka. Setelah melalui jalur diplomatik akhirnya Sipadan dan Ligitan terlepas dari Indonesia. Begitu juga dengan kelakuan negara tetangga yang lain seperti Singapura. Mereka mengeruk dan membeli banyak pasir dari Sumatera untuk menambah luas wilayah negara kecil tersebut. Kasus ini menjadi bukti ancaman dari pihak luar.



Gambar 1.3: Gerakan Separatisme Papua
Sumber: google/images

Ancaman dari dalam pun tak kalah banyak. Rakyat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan agama menghadapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka sendiri. Jika tidak dikelola dengan baik perbedaan itu akan memicu rasa ketidakpuasan dan menimbulkan konflik perpecahan sesama rakyat. Kasus ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua misalnya bisa menjadi contoh ancaman dari dalam negeri sendiri. Separatisme atau keinginan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia jika tidak diketahui akar permasalahannya dan ditanggani secepatnya akan membuat keutuhan negara Republik Indonesia terancam.



Bambar 1.4: Pulau Sipadan yang terlepas dari wilayah RI
Sumber: google/images

## 2. Upaya Menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia

**Sumpah Pemuda**

Kami, putera dan puteri Indonesia

Mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia.

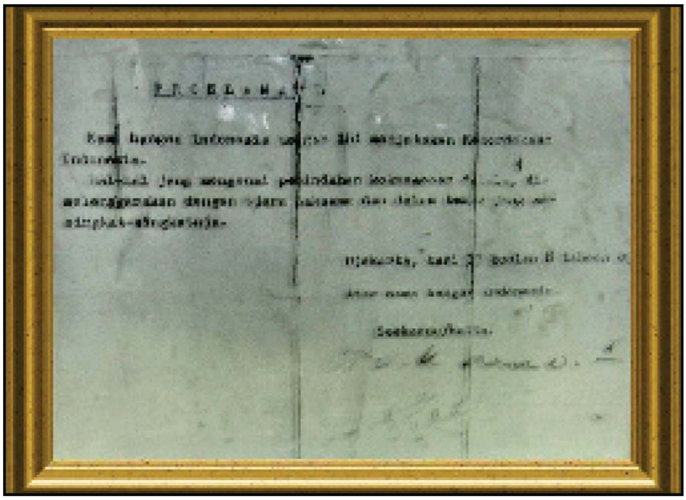
Kami, putera dan puteri Indonesia

Mengaku berbangsa satu, Bangsa Indonesia.

Kami, putera dan puteri Indonesia

Menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia

Perhatikan baik-baik teks sumpah pemuda yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut. Dulu, nenek moyang kita telah bersumpah untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Rasa persatuan dan kesatuan itu pula yang membantu rakyat Indonesia memperoleh kemerdekaan setelah sekian lama dijajah. Apakah kalian ingin negara kesatuan ini terpecah belah hanya karena perbedaan di antara warga negaranya?



Gambar 1.5: Naskah Sumpah pemuda
Sumber: kampoeng.blogspirit.com

Manusia diciptakan dengan beragam perbedaan, namun tidak semestinya perbedaan tersebut menjadi dasar untuk bermusuhan. Bahkan dalam satu keluarga saja pasti memiliki banyak perbedaan, apalagi dengan Indonesia yang rakyatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, golongan yang tersebar di banyak wilayah.

Lalu apa yang bisa dilakukan agar persatuan dan kesatuan negara ini dapat terus dipertahankan? Banyak sekali upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara dan juga pemerintah yang bertugas untuk menjaganya. Salah satunya adalah berupaya menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Upaya untuk menjaga keutuhan negara ini senantiasa dilakukan terus menerus oleh pemerintah dan alat negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat pertahanan negara yang bertugas menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman pihak luar. TNI Angkatan Darat, berwenang menjaga batas wilayah darat Republik Indonesia. TNI Angkatan Udara, berwenang menjaga wilayah udara negara. TNI Angkatan Laut juga berwenang menjaga wilayah laut negara kesatuan Republik Indonesia. TNI didukung dengan peralatan dan personil terlatih untuk mengamankan negara kesatuan ini sesuai hukum internasional.

Awal mulanya negara Republik Indonesia ini tidak memiliki kesatuan tentara sebagai alat pertahanan negara. Pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Hal ini diumumkan oleh Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat. Lalu BKR diubah menjadi

Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat Presiden. Tanggal 5 Oktober pun dikenal sebagai hari lahirnya TNI. TNI telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya yaitu:

- 24 Januari 1946, TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan disebutkan sebagai satu-satunya alat keamanan negara
- 3 Juni 1947, TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan pembauran dari TRI dan badan-badan perjuangan serta laskar perjuangan lainnya.
- Ketika Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuklah nama TNI yang resmi yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS)
- RIS pun berubah kembali menjadi Republik Indonesia, nama APRIS diubah pula menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) sampai tahun 1964
- Di tahun 1964 tersebut APRI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) digabungkan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
- Ketika reformasi bergulir, ABRI diubah kembali sesuai fungsinya. Memisahkan antara tugas penjagaan negara terhadap ancaman dari luar juga ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan RI pada TNI, dan tugas mengamankan negara dan masyarakat kepada Polri.



Gambar 1.6: TNI AD selalu siap sedia menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Sumber: google/images



Gambar 1.7: TNI selalu siap sedia menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Sumber: wikipedia

Hal ini berdasarkan Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan Polri. Pada tanggal 30 September 2004 disahkanlah Rancangan Undang-undang (RUU) TNI oleh DPR RI dan ditanda tangani pada tanggal 19 Oktober 2004 oleh Megawati, sebagai Presiden RI ketika itu.

Menurut UU TNI Pasal 7 Ayat 1, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan serluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI tersebut sesuai ayat 1 yaitu dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer non perang seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan dan lain sebagainya.

Sejarah bangsa ini pun dapat menjadi acuan untuk segenap bangsa Indonesia agar senantiasa menjaga keutuhan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi satu jua), Sumpah Pemuda dan budaya rakyat Indonesia yang memiliki toleransi tinggi dapat menjadi contoh agar bangsa Indonesia tetap bersatu.

Meski pun sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat negara untuk mengamankan keutuhan negara Republik Indonesia, namun sebagai warga negara kita juga bertanggung jawab menjaga keutuhan negara tercinta ini. Bab di bawah ini akan menjelaskan perilaku seperti apa yang dapat kalian contoh untuk ikut berpartisipasi menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

## Tugas 1.2

Buatlah kliping yang bisa kamu ambil dari guntingan surat kabar atau majalah yang menginformasikan tentang ancaman terhadap keutuhan wilayah RI dari luar dan dari dalam. Serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan kesatuan wilayah RI. Kliping berisi potongan berita dan gambar.

## C. Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia

Satu Nusa Satu Bangsa

*Ciptaan: L. Manik*

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Kita
Tanah Air Pasti Jaya
Untuk Selama-lamanya
Indonesia Pusaka
Indonesia Tercinta
Nusa Bangsa dan Bahasa
Kita Bela Bersama

Persatuan dan kesatuan bangsa dinyatakan dalam teks lagu perjuangan di atas. Tentu saja keutuhan negara Republik Indonesia harus dibela bersama demi kejayaan bangsa dan negara ini.

Keutuhan negara Indonesia dapat dipertahankan seandainya seluruh bangsa dan rakyatnya bersatu. Karena tidak ada gunanya jika ancaman dari luar bisa diredakan oleh TNI, tetapi ancaman kelompok separatisme tidak bisa diredakan karena perpecahan dari dalam rakyatnya sendiri.

Perilaku seperti apa yang bisa kalian contoh sebagai warga negara Indonesia? Banyak sekali perilaku yang dapat kalian tiru. Sebagai bagian dari masyarakat misalnya, harus saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara segenap masyarakat. Jangankan di dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan sekolah pun banyak sekali ditemui perbedaan suku dan agama. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut membuat kalian bermusuhan atau menghina satu sama lain.

Bagaimana caranya menghormati dan menghargai perbedaan tersebut? Dengan cara saling mengenal. Jika kita tidak mengenal satu sama lain, sebagai sesama warga negara, kita tidak bisa menghormati dan menghargai mereka. Pergaulan antara sesama warga negara harus dilandasi dengan semangat persatuan dan kebersamaan. Saling menyayangi sebagai sesama rakyat Indonesia. Toleransi antara pemeluk agama yang berlainan juga memudahkan kita menjaga keutuhan negara ini.

**TOKOH BANGSA**



Jenderal Sudirman dilahirkan di Bodas Karangjati, Purbalingga, 24 Januari 1916. Sudirman muda terkenal disiplin dan giat di organisasi Pramuka Hizbul Wathan. Sempat menjadi guru di sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kedisiplinan, jiwa pendidik dan kepanduan itulah yang menjadi bekal pribadinya hingga bisa menjadi pemimpin tertinggi Angkatan Perang. Ketika pendudukan Jepang, ia masuk tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor yang begitu tamat pendidikan, langsung menjadi Komandan Batalyon di Kroya. Menjadi Panglima Divisi V/Banyumas sesudah TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia (Panglima TNI). Ketika Agresi Militer II Belanda, ia yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu. 29 Januari 1950, Panglima Besar ini meninggal dunia di Magelang

TokohIndonesia DotCom

Selain itu, bersikaplah adil. Setiap orang ingin diperlakukan adil. Jika pemerintah berlaku adil tanpa membeda-bedakan, tentu kesejahteraan dan kemakmuran bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Begitu pula sebagai warga negara, kalian pun harus berlaku adil. Adil bukan berarti membagi sama rata pada semua orang. Tapi, adil berarti semua orang berhak mendapatkan apa yang diusahakan dan dimilikinya.

Perilaku lainnya misalnya, dengan sikap ringan tangan, selalu rajin menolong bagi yang membutuhkan uluran tangan kita. Bersikap arif dan bijaksana dalam memandang suatu masalah yang terjadi di

tengah masyarakat, bangsa dan negara kita. Jika ada masalah, selalu bermusyawarah dan mencari kata mufakat, keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak yang bermasalah.

Apabila perilaku-perilaku di atas dapat dicontoh oleh seluruh warga negara Indonesia, keutuhan negara Republik Indonesia dapat dipertahankan.

Berikut ini beberapa perilaku yang bisa kamu lakukan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, antara lain:

- Berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, kondisi sosial ekonomi serta pendidikannya
- Mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia
- Belajar dan bekerja, atau berkarya dengan jujur dan bersungguh-sungguh sehingga masa depan Indonesia bisa bertambah baik
- Mencari informasi mengenai sejarah bangsa dan negara dalam mewujudkan kemerdekaan dan upaya mempertahankan negara ini dari serangan pihak luar sehingga menguatkan keyakinanmu untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara (belajar dari masa lalu)
- Memperingati hari-hari besar negara seperti hari kemerdekaan, sumpah pemuda dan lain-lain dengan hati senang
- Bersikap adil pada semua temanmu, dan senantiasa membantu jika ada teman yang membutuhkan (meski berbeda suku atau agama)



Gambar 1.7: Upacara memperingati hari Kemerdekaan RI adalah wujud perilaku cinta tanah air

## Tugas 1.3

a. Buatlah satu simulasi permainan. Libatkan dua sampai empat orang teman sekelasmu. Keempat orang temanmu itu akan mendengarkan aba-aba darimu. Kamu mengajukan satu kasus pada tiap orang temanmu itu. Lalu, satu per satu temanmu akan mencontohkan perilaku yang menurutnya paling tepat dilakukan.

Bila menemui kesulitan, lihat contoh di bawah ini

Contoh kasus:

Terjadi keributan di satu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Mereka protes karena ketua RW yang baru dipilih ternyata berlainan agama dengan penduduk. Penduduk takut, sang ketua RW itu akan berlaku tidak adil. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan?

Contoh perilaku yang ditampilkan temanmu:

Saya akan menenangkan penduduk dan membiarkan perwakilan penduduk untuk menyampaikan protesnya dengan sopan dan baik.

b. **Isilah pertanyaan di bawah ini!**

1. Jelaskan secara singkat sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia!
2. Sebutkan isi pasal berapa dari UUD 1945 yang menjelaskan tentang negara Indonesia sebagai negara kesatuan!
3. Jelaskan pendapatmu tentang pengertian negara!
4. Jelaskan pengertian dari negara kesatuan!
5. Sebutkan batas-batas wilayah Republik Indonesia, dari darat dan laut
6. Wilayah laut Indonesia dibagi menjadi tiga bagian menurut Konversi Hukum Laut Internasional. Jelaskan!
7. Ancaman bagi keutuhan negara Republik Indonesia ada dua macam. Sebutkan dan jelaskan!
8. Berikan contoh upaya untuk menjaga keutuhan negara!
9. Sebutkan alasan mengapa upaya untuk menjaga keutuhan negara sangat penting dilakukan!
10. Berikan contoh perilaku dalam menjaga keutuhan negara kita!

## c. Diskusikan

Menurutmu, apakah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini dapat mengatasi masalah ancaman terhadap keutuhan negara kita? Jika tidak, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dan warga negara sepertimu. Jika ya, berikan contoh upaya positif yang telah dilakukan pemerintah. Diskusikan jawabanmu bersama teman-teman sekelas.



Baharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih pada 20 Oktober 1999 oleh suara MPR dari hasil Pemilu 1999. Dengan 373 suara MPR, Gus Dur mengalahkan calon presiden Megawati Soekarnoputri yang memperoleh 313 suara.

Dia dilahirkan di Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.[1]

Beliau belajar teknik mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1954. Pada 1955-1965 dia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar diplom ingineur pada 1960 dan gelar doktor ingineur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Dia kemudian bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm di Hamburg, hingga mencapai puncak karir sebagai wakil presiden bidang teknologi. Pada 1973 kembali ke Indonesia atas permintaan mantan presiden Suharto.

Sumber: httpwww.metrotvnews.comdataberita

## Rangkuman

1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik
2. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat serta memiliki pemerintahan pusat untuk mengatur wilayahnya
3. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau di Indonesia berjumlah lebih kurang 17.508.
4. Luas wilayah Indonesia secara keseluruhan sekitar 5.193.252 km2, dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa lebih.
5. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua. Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia pun berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
6. Batas-batas astronomi Indonesia terletak pada $6^0$ Lintang Utara (LU) – $11^0$ Lintang Selatan (LS) dan $95^0$ Bujur Timur (BT) – $141^0$ BT.
7. Ancaman terhadap keutuhan negara bisa datang dari luar dan dari dalam. Ancaman dari luar misalnya klaim negara lain atas batas wilayah negara. Ancaman dari dalam, gerakan separatisme di daerah yang bermaksud ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat pertahanan negara yang bertugas menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman pihak luar.
9. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda dan budaya dapat menjadi contoh persatuan dan kesatuan bangsa negara.
10. Perilaku seperti saling menghormati dan menghargai perbedaan, berlaku adil, toleransi antar pemeluk agama yang berlainan, tolong menolong dan lain sebagainya dapat menjadi contoh cara menjaga keutuhan negara yang dilakukan oleh warga negara.

## Uji Kompetisi

**A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar di bawah ini!**

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri pada ....
   a. 18 Agustus 1945
   b. 10 Nopember 1966
   c. 28 Oktober 1928
   d. 17 Agustus 1945

2. Negara kita adalah negara dengan sistem pemerintahan ....
   a. federal
   b. republik
   c. kesatuan
   d. presidensil

3. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, arti negara adalah ....
   a. batasan wilayah antar daerah
   b. memiliki pemerintahan pusat dan terbagi lagi menjadi negara bagian
   c. wilayah yang dihuni berbagai macam masyarakat dan tidak memiliki kekuasaan terhadap pemerintahan
   d. wilayah yang dihuni sekelompok masyararakat berjumlah besar dan mempunyai sistem pemerintahan untuk mengatur masyarakat tersebut

4. Secara geografis, Indonesia terletak pada dua benua. Yaitu ....
   a. Benua Asia dan Australia
   b. Benua Amerika dan Asia
   c. Benua Afrika dan Australia
   d. Benua Amerika dan Australia

5. Batas-batas astronomi Indonesia terletak pada:
   a. $6^0$ Lintang Selatan (LS) dan $11^0$ Lintang Utara (LU), $95^0$ Bujur Tenggara dan $141^0$ Bujur Timur (BT)
   b. $6^0$ Lintang Utara (LU) dan $11^0$ Lintang Selatan (LS), $95^0$ Bujur Timur (BT) dan $141^0$ BT
   c. $11^0$ Lintang Utara (LU) dan $6^0$ Lintang Selatan (LS), $95^0$ Bujur Timur (BT) dan $141^0$ Bujur Tenggara
   d. $11^0$ Lintang Selatan (LS) dan $6^0$ Lintang Selatan (LS), $95^0$ Bujur Timur (BT) dan $141^0$ Bujur Timur (BT)

6. Wilayah laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, kecuali ....
   a. batas laut kontinen sebuah negara diukur dari jarak paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas
   b. batas laut teritorial. Diukur dari 10 mil terluar sebuah pulau ke laut bebas
   c. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau yaitu sejauh 200 mil
   d. batas laut teritorial. Diukur dari 12 mil terluar sebuah pulau ke laut bebas. Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya, juga kekayaan alam yang terdapat di dalamnya

7. Ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan bisa datang dari luar dan dari dalam. Dari luar misalnya kasus Sipadan dan Ligitan. Dari dalam adalah ....
   a. pengerukan pasir Riau yang dijual kembali ke Singapura
   b. unjuk rasa menuntut keadilan karena kasus lumpur Lapindo
   c. pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) kelompok separatisme Maluku
   d. kerusuhan masal akibat kenaikan bahan bakar dan sembako

8. Sumpah Pemuda mengajarkan kepada generasi muda bahwa upaya untuk mempertahankan negara ini bisa dilakukan karena rasa persatuan dan kesatuan. Selain Sumpah Pemuda, darimana lagi nilai persatuan dan kesatuan bisa dijadikan contoh?
   a. Pancasila
   b. sistem kasta Agama Hindu di India
   c. budaya menang sendiri
   d. nepotisme

9. TNI Angkatan Darat bertugas mengamankan wilayah darat negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika terjadi konflik perbatasan dengan negara Timor Leste. Yang sebaiknya dilakukan TNI, adalah ....
   a. melarang warga NTT yang berbatasan dengan Timor Leste untuk pergi ke Timor Leste
   b. membuka pintu gerbang perbatasan untuk mempersilakan warga Timor Leste mengungsi ke Indonesia

c. menjaga pintu gerbang perbatasan dengan sikap siaga tanpa memperuncing permasalahan dengan pihak Timor Leste
d. memperkuat perbatasan dengan memasang sniper (penembak jitu) di kiri kanan pintu gerbang sehingga tidak ada yang bisa masuk dan keluar

10. Tetanggamu mengeluh diperlakukan tidak adil oleh Ketua RT di lingkungan tempat tinggalmu. Dia mengatakan bahwa Ketua RT itu mempersulit pengurusan perpanjangan KTP karena berbeda partai politik dengannya. Contoh perilaku yang baik dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia adalah ....
    a. tidak. Sudah menjadi kewajiban ketua RT itu untuk mengurus perpanjangan KTP meski dipersulit sekalipun
    b. ya. Ketua RT itu tetap membantu tetanggamu, meski berbeda pandangan politik
    c. ya. Tetanggamu pantas dipersulit, karena kamu sendiri pun tidak suka dengan partai politik pilihannya
    d. tidak. Semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan sama untuk mengurus KTP, apapun pandangan politiknya

## B. Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Terangkan sejarah lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan negara kesatuan
3. Sebutkan batas-batas wilayah dan posisi geografis serta astronomi Indonesia
4. Berikan contoh ancaman terhadap keutuhan negara Republik Indonesia dari dalam dan ancaman dari luar
5. Sebutkan perilaku-perilaku seperti apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga keutuhan negara tercinta ini

## C. Isilah titik-titik di bawah ini!

1. Menurut UUD 1945 Pasal 1 Ayat ... bahwa negara Indonesia adalah negara ... yang berbentuk ....
2. Sistem pemerintahan pada negara berbentuk Republik dijalankan oleh ... yang dipilih ....
3. Indonesia adalah negara ... di dunia. Pulau di Indonesia berjumlah ....

4. Kelompok separatisme ingin ... dari negara kesatuan Republik Indonesia, karena ....

   Itu menjadi contoh ancaman terhadap keutuhan negara dari ....

5. Sebagai sesama warga negara Indonesia meski berbeda suku dan agama, sudah sepatutnya kita saling ... adalah wujud perilaku menjaga ... negara

## C. Tugas

**Isilah tabel di bawah ini seperti contoh!**

| No | Contoh Kasus | Perilaku | Alasan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerusuhan antar agama dan suku di daerah itu menyebabkan banyak warga masih merasa trauma dan menimbulkan kecurigaan sesama warga. Hal itu mengakibatkan ketidaknyamanan hubungan antar warga. Apa yang seharusnya dilakukan? | Sebagai murid, kamu selalu menghargai, menghormati dan menyayangi teman-temanmu yang berlainan agama dan suku. Tetap bermain dan belajar bersama tanpa curiga. Dan mendukung program pemerintah untuk satukan warga | Setiap manusia ingin diperlakukan adil dan dihargai. Apalagi warga di daerah itu adalah sesama rakyat Indonesia. Sudah sepantasnya melupakan masa lalu dan membangun bersama demi kemajuan bangsa negara |
| 2 | Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) akan segera dilakukan di wilayahmu. Berbagai macam ornamen pendukung antar calon menghiasi sudut kota. Kamu melihat beberapa orang temanmu mencopoti poster salah satu calon yang tidak disukai mereka. Apa tindakanmu? | | |

| No | Contoh Kasus | Perilaku | Alasan |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Penduduk daerah miskin di tempat tinggalmu memprotes kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi bagi masyarakat miskin. Padahal pajak mobil dan barang mewah tidak dinaikkan. Penduduk merasa pemerintah tidak adil. Hal ini bisa menimbulkan konflik perpecahan di kemudian hari. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah? | | |
| 4 | Kamu melihat berita di televisi tentang pergerakan tentara AD negara tetangga mendekati perbatasan wilayah negara kita. Menurut Menteri Pertahanan, hal itu adalah ancaman bagi negara ini. Apa tindakanmu? | | |
| 5 | Nasib kaum pekerja seperti buruh pabrik melakukakn kegiatan *demontrasi* yang menuntut supaya ada kenaikan gaji yang disesuaikan tingkat kebutuhan standar wilayah tempat tinggal mereka. Bagaiaman penadapatmu? | | |

| No | Contoh Kasus | Perilaku | Alasan |
|---|---|---|---|
| 6 | Di dalam terjadi perbedaan pendapat mengenai tujuan berlibur yang akan dilaksanakan. Bagaimana sikapmu? | | |



Prof. Dr. H. Amien Rais (lahir di Solo, 26 April 1944) adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999 - 2004. Jabatan ini dipegangnya sejak ia dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999 pada bulan Oktober 1999.

Namanya mulai mencuat ke kancah perpolitikan Indonesia pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Soeharto sebagai salah satu orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah. Setelah partai-partai politik dihidupkan lagi pada masa pemerintahan Presiden Habibie, Amien Rais ikut mendeklarasikan Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjabat sebagai Ketua Umum PAN dari saat PAN berdiri sampai tahun 2005.

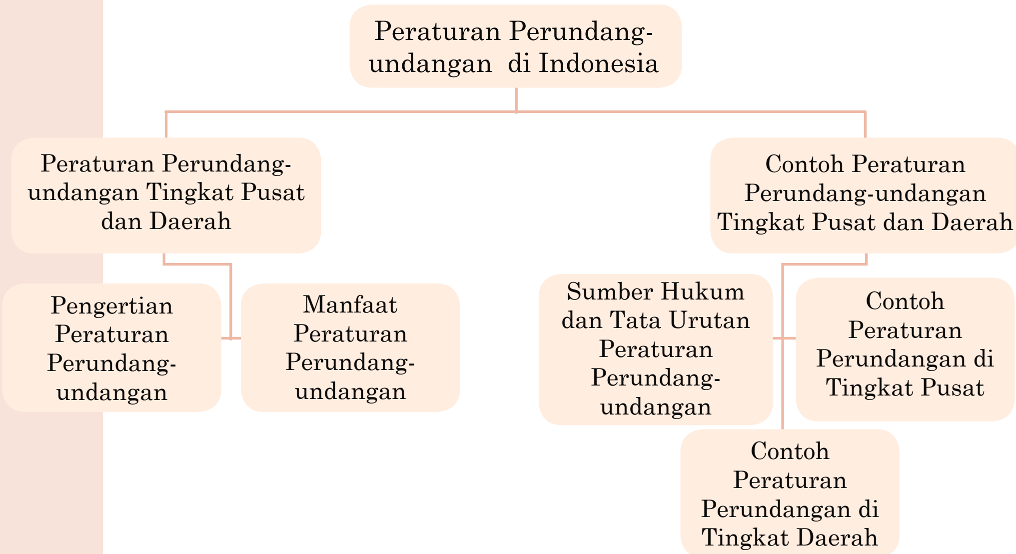
Lahir di Solo pada 26 April 1944, Amien dibesarkan dalam keluarga aktivis Muhammadiyah yang fanatik. Orangtuanya, aktif di Muhammadiyah cabang Surakarta. Masa belajar Amien banyak dihabiskan di luar negeri. Sejak lulus sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1968 dan lulus Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1969), ia melanglang ke berbagai negara dan baru kembali tahun 1984 dengan menggenggam gelar master (1974) dari Universitas Notre Dame, Indiana, dan gelar doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat.

Kembali ke tanah air, Amien kembali ke kampusnya, Universitas Gadjah Mada sebagai dosen. Ia bergiat pula dalam Muhammadiyah, ICMI, BPPT, dan beberapa organisasi lain. Pada era menjelang keruntuhan Orde Baru, Amien adalah cendekiawan yang berdiri paling depan. Tak heran ia kerap dijuluki Lokomotif Reformasi.

Sumber: bp0.blogger.com.

# Bab 2 Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

## Peta Konsep




## Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.
2. Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, dan larangan merokok.

## Kata Kunci

- Negara
- Pusat
- UUD 1945
- Peraturan
- Daerah
- Pancasila
- Hukum
- Tertib

Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri. Peraturan berupa undang-undang atau contoh lainnya dibuat agar masyarakat hidup tertib, aman, adil, dan sejahtera. Lalu, apa itu peraturan? Seperti yang kita ketahui, ada dua jenis peraturan di Indonesia, yaitu peraturan pada tingkat pusat dan peraturan pada tingkat daerah. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kalian harus mengetahui dan dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan tingkat pusat dan peraturan tingkat daerah. Dan dapat memberikan contoh-contoh dari peraturan tingkat pusat dan daerah tersebut.

# A. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

## 1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Bayangkan keadaan rumah di mana ayah, ibu dan anak-anaknya hidup bersama tanpa satu aturan. Sang ayah sering pulang malam dan kurang peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Ibu, tidak menjaga kebersihan rumah malahan asyik menonton televisi seharian. Anak-anak bebas berkeliaran keluar masuk rumah membawa teman dan tidak punya jadwal tetap untuk belajar. Pasti rumah itu akan terlihat kacau balau, kotor, dan tidak menyenangkan untuk ditempati bukan? Itulah keadaan rumah yang tidak memiliki aturan yang disepakati bersama. Begitu pula dengan negara seperti Indonesia. Tentu, harus memiliki aturan agar kehidupan warga negaranya tertib, aman, dan sejahtera.

Menurut UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, hasil amandemen, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu semua warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum, apapun pekerjaan atau jabatan yang dimilikinya.

Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang dibuat secara tertulis yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat di negara tersebut. Peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh aparatur negara yang berwenang.

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum, karena selain peraturan perundang-undangan juga ada yang dikenal sebagai hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin. Undang-undang pun adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Undang-undang terbagi atas dua macam, yaitu:

1. **Undang-undang dalam arti formal**

   Undang-undang dalam arti formal adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini ter-cantum dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 UUD 1945.

2. **Undang-undang dalam arti material**

   Undang-undang dalam arti material adalah peraturan perundang-undangan itu sendiri, sehingga undang-undang dalam arti formal merupakan bagiannya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibagi menjadi dua. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat. Dan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dibuat oleh aparatur negara dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia juga lembaga-lembaga negara yang berkedudukan di pusat negara.

Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dibuat oleh kepala daerah dengan meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Peraturan ini berlaku untuk warga negara yang bertempat tinggal atau pendatang di daerah tersebut.



Gambar 2.1: Polisi melaksanakanperaturan undang-undang lalu lintas untuk ketertiban lalu lintas

## Tugas 2.1



Tuliskan pada secarik kertas, pengertian dari peraturan perundang-undangan menurutmu pendapatmu.

## 2. Manfaat Peraturan Perundang-undangan

Masih ingatkah kamu keadaan rumah yang tidak memiliki aturan bagi para penghuninya? Tentu saja sebuah aturan dibuat agar semua orang dapat menikmati manfaatnya.

Agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tertib, aman dan sejahtera maka dibuatlah peraturan perundang-undangan. Manfaat dari tegaknya peraturan perundang-undangan tersebut dapat tercapai apabila seluruh warga negara mematuhinya.

Misalnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga-lembaga tinggi negara. Peraturan tersebut memberikan petunjuk dan batasan agar semua lembaga negara tersebut berperan sesuai fungsi dan kewenangannya. Tanpa berlaku berlebihan atau sebaliknya. Sehingga semua lembaga negara itu dapat berperan sesuai peraturan dan saling mendukung.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk warga negara dimaksudkan agar kehidupan warga negara berjalan sesuai jalur hukum sehingga tidak ada warga negara yang dirugikan. Peraturan tersebut juga menjamin hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang sama kedudukannya di hadapan hukum.



Gambar 2.2: Salah satu contoh mentaati peraturan di sekolah dalam menjaga kebersihan

Manfaat peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Menjaga ketertiban di tengah masyarakat
2. Menjamin hak-hak warga negara
3. Mengatur kewajiban warga negara
4. Memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara

5. Mengamankan wilayah negara Republik Indonesia
6. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara
7. Memberikan rasa aman pada warga negara
8. Memberikan rasa takut dan efek jera pada para pelanggar peraturan
9. Memberikan keadilan peradilan bagi seluruh warga negara

Dan banyak lagi manfaat lain yang bisa diperoleh dengan berlakunya peraturan perundang-undangan, sesuai isi peraturan tersebut.

### Tugas 2.2



Diskusikan dengan teman sebangkumu, manfaat dari diberlakukannya peraturan perundang-undangan di negara ini.

## B. Contoh-contoh Peraturan Perundangan di Indonesia

### 1. Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Agar hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat sesuai prioritas kepentingannya, maka harus dibedakan. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berdasarkan sumber hukum yang berlaku di negara kita. Menurut Tap MPR No III/MPR/2000, sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

Tata urutan peraturan perundang-undangan, menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Ketetapan MPR
c. Undang-Undang (UU)
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
e. Peraturan Pemerintah (PP)
f. Keputusan Presiden (Keppres)
   Keppres dibuat oleh presiden dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mengatur pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
g. Peraturan Daerah (Perda)

Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

### a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 disusun dan ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta.

UUD 1945 sebagai bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang ada di Indonesia. UUD 1945 adalah dasar hukum tertulis yang memuat berbagai macam hal dalam penyelenggaraan negara. Karena UUD 1945 adalah peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh menyimpang dari UUD 1945. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali sejak tahun 1999 oleh MPR. Amandemen pertama pada 19 Agustus 1999, amandemen kedua pada 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada 9 November 2001, dan amandemen terakhir pada 10 Agustus 2002. Amandemen dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

### b. Undang-undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat UU bersama dengan Presiden. UU dibuat sebagai wujud pelaksanaan UUD 1945 dan Tap MPR.

Materi yang berada pada undang-undang berisi hal-hal yang menyang-kut ketentuan UUD 1945 atau Ketetapan MPR RI.

### c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Perpu dibuat oleh Presiden jika terjadi hal-hal tertentu yang mendesak, namun dengan ketentuan seperti:

- Perpu harus diajukan oleh presiden kepada DPR dalam persidangan DPR berikutnya
- DPR berhak menolak atau menerima rancangan Perpu tersebut, dengan tidak melakukan perubahan
- Jika DPR telah menolak, maka Perpu tersebut harus dibatalkan

Hal ini tercantum dalam pasal 22 UUD 1945 bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang berhak ditetapkan oleh Presiden dan harus mendapatkan persetujuan DPR.

### d. Peraturan Pemerintah

PP dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan pelaksanaan atau perintah undang-undang. Peraturan Pemerintah misalnya

peraturan tentang lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengemban tugasang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Bank Indonesia yang mengemban tugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah. Ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara.

Presiden diberikan kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang seperti yang diharuskan (Pasal 5 ayat 2), yaitu:

1. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

### e. Peraturan Presiden

Perpres ini bersifat khusus yang berarti peraturan tersebut dibuat untuk mengatur segala hal yang bersifat sementara dan tertentu saja.

Perpres diterapkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dan peraturan di atasnya, yaitu PP.

### f. Peraturan Daerah

Perda dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan gubernur untuk melaksanakan peraturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus yang terjadi di daerah tersebut. Perda kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD Tingkat Kabupaten atau DPRD TingkatKota bersama bupati atau walikota.

Seperti peraturan lain di atasnya, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan peraturan daerah lainnya.

**Tahukah Kamu?**

**Jenis Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, meliputi:

1. Undang-undang
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden

Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah, yaitu:
1. Peraturan Daerah Provinsi
2. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota
3. Peraturan Desa

## Tugas 2.3



Buatlah kliping dari guntingan surat kabar atau majalah yang menggambarkan contoh pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### Tokoh Pemerintahan



Mohammad Andi Mattalatta, S.H., M.H. (Bone, Sulawesi Selatan, 30 September 1952) adalah Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR periode 2004 - 2007. Pada bulan Mei 2007, ia ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM Indonesia menggantikan Hamid Awaluddin. Politisi Golkar yang sudah beberapa periode menjadi anggota DPR (sejak 1988 sampai 2007) itu sebelumnya berprofesi sebagai dosen di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Dia dikenal sebagai tokoh yang sangat peduli terhadap keadilan dan HAM, serta pencinta perdamaian. Dia tak bisa diam jika melihat ada yang tak beres, apalagi mengarah pada perpecahan yang dapat berakibat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Andi juga sering dijuluki oleh rekan-rekannya sebagai pemburu keadilan. Dia memang sering berperan dalam berbagai putusan penting di DPR.

Dari berbagai sumber

## 2. Contoh Peraturan Perundangan di Tingkat Pusat

Banyak sekali contoh peraturan perundangan di tingkat pusat yang bisa kalian temukan di surat kabar atau internet. Misalnya peraturan menteri terkait kebijakan pada lembaga kementerian yang dipimpinnya. Berikut ini contoh peraturan perundangan di tingkat pusat, yaitu:

a. Peraturan Lembaga Negara atau badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden, antara lain Peraturan Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial

b. Peraturan Menteri (Permen), sepanjang diperintahkan atau didelegasikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan di atasnya

c. Peraturan Kepala LPND/Komisi/Badan atau Peraturan Ditjen suatu Departemen, sepanjang diperintahkan atau didelegasikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan di atasnya

Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat terdiri dari berbagai macam jenis dan isi peraturan. Peraturan tersebut ada yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat atau tidak. Contohnya:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2005 tentang Ban-tuan Keuangan Kepada Partai Politik yang berisi persyaratan mendapatkan bantuan, tata cara penyerahan bantuan, laporan bantuan keuangan.

  Peraturan ini tidak berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

- UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 21 Tahun 1997, mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berisi kewajiban para wajib pajak tanpa perlu menunggu surat ketetapan pajak terlebih dulu.

  Pajak adalah kewajiban setiap warga negara, sehingga peraturan ini ber-hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

- UU RI No. 14 Tahun 1992 Pasal 26 Ayat 1 tentang Peraturan Lalu Lintas yang berisi kewajiban pejalan kaki untuk berjalan pada bagian jalan yang sudah disediakan (trotoar) dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang te-lah disediakan bagi pejalan kaki (jembatan penyeberangan dan zebra cross).

  Peraturan ini juga berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat banyak.

- UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 1 yang berisi sanksi bagi mereka yang terbukti melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sen-diri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, berupa hukuman pidana penjara dan denda.

  Peraturan perundang-undangan tentang korupsi juga termuat dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15 Ayat 1, Peraturan Pemerintah RI Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 7 Ayat 1, serta masih banyak lagi.

## Tugas 2.4



Carilah contoh lain tentang Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat. Kamu bisa mencarinya dari surat kabar, internet atau media lainnya. Tuliskan di selembar kertas.

## 3. Contoh Peraturan Perundangan di Tingkat Daerah

Setiap daerah di Indonesia baik tingkat Provinsi atau di bawahnya pun memiliki peraturan perundangan. Peraturan tersebut disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada daerah tersebut.

Berikut ini contoh peraturan perundangan di tingkat daerah, yaitu:

a. Peraturan Daerah Provinsi
b. Peraturan Gubernur Provinsi
c. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota
d. Peraturan Bupati atau Walikota
e. Peraturan Desa (Perdesa)

UUD RI Pasal 18 Ayat 6 berbunyi, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Contoh peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, misalnya:

- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 Bab IV tentang Kawasan Dilarang Merokok Pasal 6 Ayat 3 yang berisi ancaman bagi para pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan jika merokok di tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yaitu sekolah.

  Selain di Jakarta, kota Bandung pun memiliki peraturan perundangan serupa, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Pasal 23 Ayat 1 yang berisi tempat-tempat sebagai kawasan dilarang merokok. Yaitu, angkutan umum, sekolah, arena kegiatan anak, tempat ibadah, taman, rumah sakit, tempat kerja dan lain-lain. Serta Pasal 48 tentang sanksi berupa denda lima juta rupiah bagi mereka yang melanggar.

- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 Pasal 41c tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan Kota yang berisi larangan mengotori, merusak, mencoret-coret jalan, jembatan, dan bangunan pelengkapnya, pada rambu lalu lintas, pohon-pohon, dan fasilitas umum lainnya. Bila ada yang melanggar maka sanksi berupa denda sebesar lima juta rupiah.
- Peraturan Daerah Kotamadya Tangerang No. 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang berisi penjelasan, penindakan, pengendalian, partisipasi masyarakat, penyidikan. Perda ini dibuat sebagai upaya melestarikan nilai luhur di masyarakat.

Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur hajat hidup orang banyak termasuk beberapa peraturan yang diberlakukan mengenai pajak, anti korupsi, mengenai lalu lintas dan larangan merokok. Seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat ini tentunya memiliki manfaat yang banyak bagi seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya bagi pemerintah saja. Apakah kamu sudah mengetahui peraturan perundangan apa saja itu? Simak di bawah ini.

Berikut ini contoh peraturan perundang-undangan mengenai Pajak yaitu:

- Keputusan Menteri Keuangan No. 626/KM.1/2007 Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor dan Pajak Penghasilan.
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER - 114/PJ./2007 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak.
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 06/PJ.03/2007 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2007 Tentang Penetapan Jenis Barang Tertentu kena Pajak
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



Gambar 2.3: Pelayanan pajak di kantor pajak

**Tahukah Kamu?**

**Apa itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN?**

Jika kamu membeli makanan di restoran biasanya di struk pembelian selain harga asli makanan kamu pun harus membayar PPN. Lalu apa itu PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen.

Pajak ini termasuk jenis pajak tidak langsung, yang berarti pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak. Si penanggung pajak yaitu konsumen menyetorkannya kepada pedagang. Di Indonesia, PPN dikenakan tarif tunggal, yaitu sebesar 10 %.

Berikut ini contoh peraturan perundang-undangan mengenai Anti Korupsi, antara lain:

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

**Tahukah Kamu?**

**Info Korupsi Indonesia**

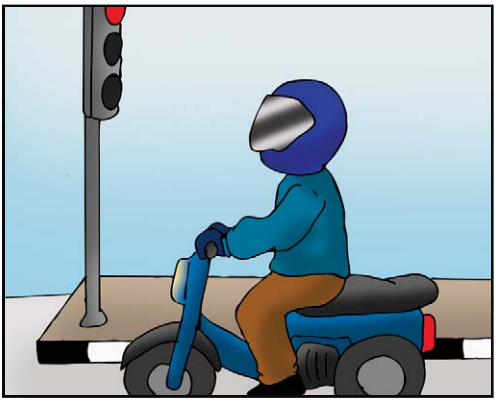
Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, yang berarti perilaku para pejabat publik (politikus atau pegawai negeri) yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut data Transparency Internasional, indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2006 lalu bernilai 2,4 meningkat dari tahun 2005 yang bernilai 2,2. Nilai ini ikut mendongkrak urutan Indonesia satu peringkat dari negara terkorup keenam pada 2005 menjadi ketujuh (dari 163 negara).

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi, yaitu Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, dan lembaga-lembaga non pemerintah seperti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Berikut ini contoh peraturan perundang-undangan mengenai Lalu Lintas, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.



Gambar 2.4: Mematuhi Peraturan Perundang-undangan lalu lintas

Berikut ini contoh peraturan perundang-undangan mengenai Larangan Merokok, antara lain:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Rokok di Tempat Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Ke-indahan (K3), yang salah satu pasalnya yaitu 23 Ayat 1 mengenai Larangan Merokok di Tempat Publik seperti Tempat Umum, Sarana Kesehatan, Tempat Kerja, Tempat Proses Belajar Mengajar, Arena Kegiatan Anak, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok .




Gambar 2.5: Peraturan larangan merokok di tempat umum

## Tugas 2.5



a. Tulislah contoh berita tentang peraturan perundangan yang kamu lihat di televisi. Misalnya berita penangkapan tersangka koruptor, catat baik-baik informasi yang disampaikan si pembaca berita. Minimal dua contoh berita.

### b. Isilah pertanyaan di bawah ini!

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebutkan dasar hukum tertulisnya!
2. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan!
3. Jelaskan perbedaan antara peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah!
4. Jelaskan manfaat dari tegaknya peraturan perundang-undangan!
5. Sebutkan sumber hukum di Indonesia!
6. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan jelaskan!
7. Siapakah yang membuat Perda?
8. Sebutkan contoh peraturan perundangan di tingkat pusat!
9. Sebutkan contoh peraturan perundangan di tingkat daerah!
10. Jelaskan peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang larangan merokok!

### c. Diskusikan

Bentuklah kelompok yang terdiri dari empat orang teman sekelasmu. Diskusikan mengenai peraturan perundangan yang ada di daerahmu. Apakah sudah dikenal dan dituruti oleh masyarakat atau belum. Jelaskan alasannya.

## Rangkuman

1. Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang dibuat secara tertulis, yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat di negara tersebut.
2. Peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh aparatur negara yang berwenang.
3. Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dibuat oleh aparatur negara dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia juga lembaga-lembaga negara yang berkedudukan di pusat negara.
4. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dibuat oleh kepala daerah dengan meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Peraturan ini berlaku untuk warga negara yang bertempat tinggal atau pendatang di daerah tersebut.
5. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk warga negara dimaksudkan agar kehidupan warga negara berjalan sesuai jalur hukum sehingga tidak ada warga negara yang dirugikan.
6. Manfaat peraturan perundang-undangan antara lain, menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menjamin hak-hak warga negara, mengatur kewajiban warga negara, memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara dan mengamankan wilayah negara Republik Indonesia.
7. Menurut Tap MPR No III/MPR/2000, sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.
8. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, Perda.
9. Contoh peraturan perundangan di tingkat pusat adalah Peraturan Lembaga Negara atau badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala LPND/Komisi/Badan atau Peraturan Ditjen suatu Departemen.
10. Contoh peraturan perundangan di tingkat daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Peraturan Bupati atau Walikota, Peraturan Desa (Perdesa).

# Uji Kompetisi

**A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar di bawah ini!**

1. UUD 1945, Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Indonesia adalah ....
   a. negara demokrasi
   b. negara monarki
   c. negara hukum
   d. negara kertagama

2. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam ....
   a. hak azasi manusia
   b. hukum
   c. pemerintahan
   d. negara

3. Pengertian peraturan perundang-undangan, yaitu ....
   a. hukum yang diatur oleh negara demi kepentingan masyarakat
   b. hukum yang sah secara legal dan mengikat warga negara saja
   c. hukum yang dibuat oleh aparatur negara untuk ditaati oleh penguasa
   d. hukum yang dibuat secara tertulis yang mengatur segala sendi kehidupan

4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terbagi dua. Yaitu ....
   a. peraturan perundangan tingkat daerah dan tingkat provinsi
   b. peraturan perundangan tingkat pusat dan tingkat daerah
   c. peraturan perundangan tingkat provinsi dan tingkat pusat
   d. peraturan perundangan tingkat dasar dan tingkat atas

5. Peraturan ini dibuat oleh aparatur negara dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Nama peraturan ini adalah ....
   a. peraturan perundangan tingkat pusat
   b. peraturan perundangan tingkat provinsi
   c. peraturan perundangan tingkat daerah
   d. peraturan perundangan tingkat atas

6. Manfaat peraturan perundang-undangan, kecuali ....
   a. memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara
   b. menjamin hak-hak warga negara
   c. menjaga ketertiban di tengah masyarakat
   d. mengamankan wilayah milik pribadi setiap warga negara

7. Tata urutan peraturan perundang-undangan, kecuali ....
   a. UUD 1945
   b. peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
   c. peraturan Gubernur Provinsi
   d. ketetapan MPR

8. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dibuat oleh presiden jika terjadi hal-hal tertentu yang mendesak seperti di bawah ini, kecuali ....
   a. DPR berhak menolak atau menerima rancangan Perpu tersebut, dengan tidak melakukan perubahan
   b. perpu bisa dirubah oleh DPR
   c. jika DPR telah menolak, maka Perpu tersebut harus dibatalkan
   d. perpu harus diajukan oleh presiden kepada DPR dalam persidangan DPR berikutnya

9. Peraturan perundangan di tingkat pusat seperti Peraturan Lembaga Negara atau badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden adalah ....
   a. peraturan menteri
   b. peraturan Ditjen
   c. peraturan Kepala LPND
   d. peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU

10. Pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah provinsi lainnya memiliki peraturan perundangan tentang larangan merokok. Jenis peraturan ini termasuk ....
   a. peraturan perundangan tingkat pusat
   b. peraturan perundangan tingkat daerah

c. peraturan perundangan yang berhubungan langsung dengan kehidupan pemerintah

d. peraturan perundangan yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat

## B. Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Mengapa warga di suatu lingkungan masyarakat membutuhkan peraturan perundang-undangan?
2. Apabila pada suatu negara tidak dibuat peraturan perundang-undangan, apa yang akan terjadi?
3. Sebutkan urutan peraturan perundang-undangan menurut Tap MPR No. III/MPR/2000, sertakan dengan contoh
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2005, berisi tentang?
5. Peraturan tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan Kota adalah peraturan daerah Bandung nomor?

## c. Isilah titik-titik di bawah ini!

1. Menurut UUD 1945 Pasal ... hasil amandemen, negara Indonesia adalah negara .... Oleh karena itu semua warga negara harus ... dan ... terhadap hukum ... yang ....
2. Peraturan perundang-undangan di ... dibuat oleh kepala daerah dengan meminta persetujuan dari ....
3. Manfaat dari tegaknya ... tersebut dapat tercapai apabila ... mematuhinya.
4. Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh ... untuk memudahkan .... atau ... undang-undang.
5. UU Republik Indonesia No ... tentang perubahan UU No. 21 Tahun 1997, mengenai .... Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berisi kewajiban para wajib pajak tanpa perlu menunggu .... terlebih dulu.

## D. Tugas

Isilah tabel di bawah ini. Carilah contoh dari masing-masing peraturan perundang-undangan yang kamu ketahui di negara kita!

| No | Contoh Peraturan perundangan tingkat pusat | Contoh Peraturan perundangan tingkat daerah |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# Uji Kompetensi Semester I

**A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar di bawah ini!**

1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tercantum dalam UUD 1945 pasal ....
   a. pasal 4 ayat 2
   b. pasal 1 ayat 1
   c. pasal 2 ayat 4
   d. pasal 3 ayat 3

2. Sistem pemerintahan pada negara yang berbentuk republik dijalankan oleh ....
   a. Perdana Menteri
   b. Yang Dipertuan Agung
   c. Raja dan para menteri
   d. Presiden

3. Berikut ini pernyataan tentang negara yang benar, kecuali ....
   a. wilayah yang dihuni sekelompok masyararakat berjumlah besar
   b. mempunyai sistem pemerintahan untuk mengatur masyarakat tersebut
   c. wilayah tersebut dimiliki oleh segelintir orang yang berkuasa
   d. wilayah yang dihuni dan mempunyai kekuasaan terhadap pemerintahan

4. Pulau di Indonesia kira-kira berjumlah ....
   a. 16.305 pulau, besar, dan kecil
   b. 15.678 pulau, besar, dan kecil
   c. 17.507 pulau, besar, dan kecil
   d. 17.508 pulau, besar, dan kecil

5. Batas laut teritorial diiukur dari 12 mil terluar sebuah pulau ke laut bebas. Indonesia memiliki ....
   a. kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan pulau terluar
   b. kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya, juga kekayaan alam yang terdapat di dalamnya
   c. kedaulatan atas air, dasar laut, dan udara di sekitarnya, tapi tidak kekayaan alam yang terdapat di dalamnya
   d. kedaulatan titik terluar pantai sebuah pulau

6. Malaysia mengklaim bahwa pulau Sipadan dan Ligitan tersebut adalah milik mereka. Hal ini adalah contoh ancaman ....
   a. ancaman dari luar
   c. ancaman dari dalam
   b. ancaman yang tak masuk akal
   d. ancaman diplomatik

7. Sumpah Pemuda telah menyatukan para pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda dapat dijadikan contoh ....
   a. persatuan dan kesatuan bangsa
   b. nilai moral
   c. sejarah masa lampau
   d. tindakan patriotik

8. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan agama. Hal ini dapat memicu konflik atau ancaman keutuhan negara dari dalam. Yang bisa dilakukan seorang siswa SD sepertimu adalah ....
   a. tidak pernah membeda-bedakan teman meski berlainan suku dan agama
   b. selalu berusaha bermain dengan teman satu daerah saja
   c. mengalah demi kepentingan bersama meski kamu merasa diperlakukan tidak adil
   d. mengikuti petunjuk gurumu dalam memilih teman

9. Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang dibuat secara tertulis. Hukum itu dimaksudkan untuk mengatur ....
   a. kesejahteraan ekonomi seluruh warga negara
   b. warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut
   c. pemerintah dan lembaga pemerintah saja
   d. seluruh sendi kehidupan masyarakat

10. Peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh aparatur negara dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini adalah ....
   a. peraturan perundangan di Indonesia
   b. peraturan perundangan tingkat daerah
   c. peraturan perundangan aparatur negara
   d. peraturan perundangan tingkat pusat

11. Mengamankan wilayah negara Republik Indonesia, menjaga ketertiban di tengah masyarakat, mengatur kewajiban warga negara adalah beberapa hal yang bisa didapatkan dari ....
    a. fungsi peraturan perundangan
    b. sistem peraturan perundangan
    c. manfaat peraturan perundangan
    d. batasan peraturan perundangan

12. Ketetapan MPR adalah salah satu tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu ....
    a. Tap MPR No. II/MPR/1999
    b. Tap MPR No. IV/MPR/2002
    c. Tap MPR No. III/MPR/2000
    d. Tap MPR No. V/MPR/2003

13. UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah peraturan perundang-undangan yang berisi tentang ....
    a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
    b. kawasan dilarang merokok
    c. penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, keindahan kota
    d. pemberantasan tindak pidana korupsi

14. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, adalah UUD RI pasal ....
    a. pasal 23 Ayat 1
    c. pasal 18 Ayat 6
    b. pasal 48 Ayat 2
    d. pasal 6 Ayat 3

15. Banyak provinsi di Indonesia yang membuat peraturan perundang-undangan mengenai hal ini di tingkat daerah. Contohnya DKI Jakarta dan Kota Bandung. Peraturan mengenai hal ....
    a. korupsi
    c. kawasan dilarang merokok
    b. bea pajak
    d. ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota

## B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Kapan negara kesatuan Republik Indonesia berdiri?
2. Apakah yang disebut dengan negara kesatuan itu?
3. Jelaskan posisi geografis Indonesia!
4. Berikan contoh ancaman dari dalam terhadap keutuhan NKRI!
5. Apa saja yang bisa kamu lakukan untuk berperan serta menjaga keutuhan negara ini?
6. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan!
7. Sebutkan manfaat peraturan perundang-undangan!
8. Sebutkan sumber hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia!
9. Jelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Tap MPR III/MPR/2000!
10. Berikan contoh peraturan perundang-undangan di daerahmu!

## C. Tugas Mandiri

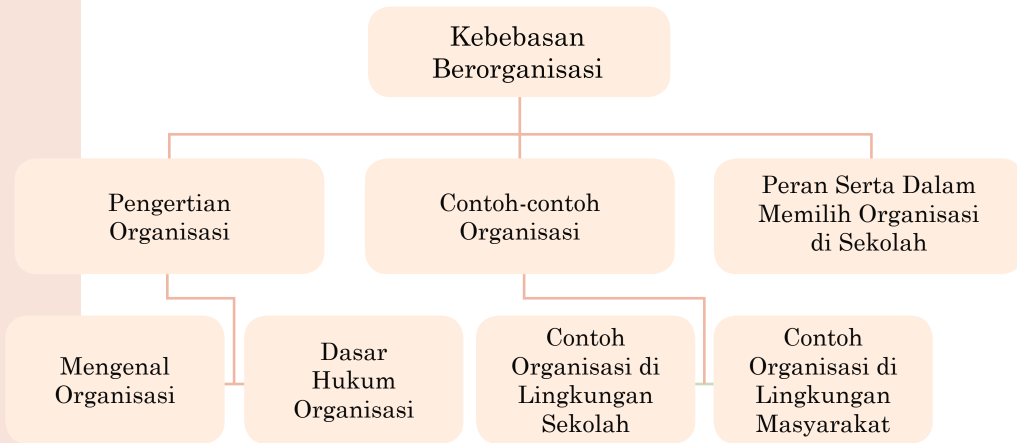
Buatlah makalah singkat minimal lima halaman, mengenai negara kesatuan Republik Indonesia, ancaman nyata dan upaya menjaga keutuhan negara ini. Sertakan contoh ancaman tersebut dan upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulanginya.

## d. Tugas Kelompok

Buatlah permainan yang melibatkan banyak teman di kelas. Bayangkan siswa-siswi adalah para pembuat peraturan perundang-undangan. Ada yang membuat contoh UU, ada yang membuat contoh Tap MPR, begitu seterusnya sampai menjadi tata urutan peraturan perundang-undangan.

# Bab 3 Kebebasan Berorganisasi

## Peta Konsep




## Kompetensi Dasar

1. Mendeskripsikan pengertian organisasi.
2. Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.
3. Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah.

## Kata Kunci

- Lingkungan
- Masyarakat
- Kewajiban
- Sekolah
- Peranserta
- Lembaga
- Organisasi
- Hak
- Pemerintah

Keluarga adalah organisasi terkecil dari masyarakat. Di dalam keluarga ada yang memegang peran tertentu seperti ayah dan ibu kalian yang berperan sebagai orangtua dan masing-masing mereka memiliki hak dan tanggung jawabnya pula. Sebagai anak, kalian pun memiliki hak dan tanggung jawab sendiri. Di lingkungan sekolah dan masyarakat juga terdapat organisasi-organisasi yang berwujud, serta memiliki hak dan kewajibannya. Berperan serta di dalam sebuah organisasi adalah langkah nyata untuk peduli terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan di sekitar kita.

# A. Pengertian Organisasi

## 1. Mengenal Organisasi

Kamu dapat menemukan contoh organisasi di sekitarmu, misalnya di sekolah di keluarga, bahkan lingkungan di sekitar rumahmu. Bisakah kamu menjelaskan pengertian organisasi? Organisasi, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti himpunan, perkumpulan orang-orang yang mempunyai dasar dan tujuan tertentu yang sama.

Organisasi yang dalam bahasa Yunani berarti opyavov, organon berarti alat. Biasanya ilmu mengenai organisasi dipelajari dalam bidang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi dan manajemen. Organisasi dapat dikatakan sebagai suatu kerjasama berdasarkan pembagian kerja yang telah ditetapkan. Karena manusia adalah mahluk sosial yang hidupnya berkelompok, maka dibutuhkan suatu perkumpulan atau organisasi untuk membuat hidup manusia lebih teratur.

Ingatkah kamu dengan peraturan yang berlaku mengenai organisasi? Di dalam pasal 28 UUD 1945 disebutkan mengenai organisasi dengan istilah berserikat. Tetapi jika kerjasama tersebut tidak tetap atau permanen, maka organisasi diistilahkan sebagai berkumpul.

Bentuk organisasi ada yang di bawah pemerintahan dan organisasi di luar pemerintahan atau non pemerintah. Organisasi pemerintah misalnya departemen-departemen, lembaga negara dan banyak lagi lainnya. Organisasi non pemerintah misalnya partai politik, persatuan olahraga, organisasi masyarakat dan banyak contoh lainnya.

Organisasi memiliki struktur yang jelas dan tersusun. Struktur ini menjelaskan hak dan kewajiban para anggotanya. Contohnya, pembagian kerja, cara memilih pimpinan dan jabatan khusus lainnya. Coba bayangkan, di keluarga saja ada struktur yang jelas mengenai siapa yang memegang

kepemimpinan di rumah, yaitu ayah. Sedangkan ibu bertugas mengatur rumah tangga. Begitu pula dengan organisasi yang lebih besar *lingkup* tugasnya seperti partai politik.

Organisasi melibatkan banyak orang. Organisasi tidak bisa berjalan jika orang-orang di dalam organisasi tersebut tidak bisa bekerja sama dengan baik. Meski pun berbeda jabatan atau strukturnya, setiap orang dalam organisasi harus mematuhi peraturan bersama atau tata tertib yang sudah dibuat untuk kepentingan seluruh anggota organisasi tersebut.

Tak kalah pentingnya bahwa organisasi memiliki satu cita-cita dan tujuan yang sama. Istilah ilmiahnya visi dan misi. Jika terjadi perbedaan tujuan atau kepentingan, maka organisasi tersebut bisa goyah dan akhirnya bubar.

Organisasi dapat dibedakan menurut visi dan misinya atau jenis organisasi tersebut. Berikut ini adalah organisasi yang dibedakan menurut jenisnya, yaitu:

- Organisasi yang satu bidang, misalnya organisasi profesi

  Contoh : Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
  Perhimpunan Humas Indonesia (Perhumas)
  Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi)

- Organisasi yang satu fungsi, misalnya organisasi kewanitaan

  Contoh : Persatuan Istri Tentara (Persit)

- Organisasi yang seagama, misalnya organisasi keagamaan

  Contoh : Muhammadiyah
  Nahdlatul Ulama
  Persatuan Islam (Persis)

## 2. Dasar Hukum Organisasi

Republik Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk berorganisasi. Hal itu dijamin secara hukum melalui UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Selanjutnya UUD 1945 amandemen terakhir, Pasal 28E ayat 3, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Yang berarti semua warga negara dijamin untuk mendirikan organisasi. Selama organisasi itu memiliki manfaat bersama dan tidak bertentangan dengan dasar negara, Pancasila.

Lalu Pasal 28 F yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kedua pasal 28 ini termasuk Bab X A yang membahas mengenai Hak Azasi Manusia. Kebebasan untuk berorganisasi, mendirikan organisasi atau menjadi anggota suatu organisasi memang termasuk ke dalam hak azasi manusia. Sehingga negara dalam hal ini pelaksanaannya dijamin oleh pemerintah telah menyediakan dasar hukumnya.

Tata cara mengemukakan pendapat dalam berserikat dan berkumpul pun diatur dengan Undang-undang. Misalnya ketika kita memiliki hak dan kebebasan untuk membentuk organisasi, maka kita pun harus bertanggung jawab atas organisasi yang dibuat. Selain itu kebebasan yang bertanggung jawab berarti:

- Dalam mengemukakan pendapat tersebut kita tak lupa memperhatikan batas-batas penghargaan terhadap orang lain (tidak ingin menang sendiri)
- Dalam berorganisasi kita harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat tempat organisasi itu didirikan, misalnya norma agama, kesopanan, hukum yang berlaku dan sebagainya

Ketika organisasi sudah dibentuk, maka setiap anggotanya berhak mengeluarkan pendapatnya demi kemajuan organisasi. Setiap warga negara berhak mengikuti organisasi apa pun yang dirasakan bermanfaat untuk dirinya pribadi dan bangsa atau negaranya.

Ketika kita berorganisasi maka secara tak langsung kita belajar untuk mengenal berbagai macam *karakter* manusia dan belajar untuk mengatur keinginan kita agar tidak *egois*. Dan kepentingan organisasi harus selalu didahulukan daripada kepentingan pribadi tanpa menimbulkan masalah bagi kepentingan masyarakat umum lainnya.

Berikut ini beberapa Undang-undang tentang kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat, antara lain:

a. UU RI No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
b. UU RI No. 31 tahun 2002 tentang partai politik
c. UU RI No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
d. UU RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Setelah kamu mengetahui tentang hak-hak sebagai warga negara untuk berserikat dan berkumpul atau dalam kata lain berorganisasi maka diharapkan kamu dan semua warga negara Indonesia bisa mengikuti atau berperan serta dalam organisasi, setidaknya satu organisasi, karena berorganisasi adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang pelajar kamu bisa mengikuti berbagai macam organisasi yang ada di sekolah atau di dalam masyarakat, misalnya Karang Taruna, organisasi musik, organisasi olahraga, Palang Merah, Pramuka dan sebagainya.



Gambar 3.1: PMR
Sumber: www.beritajakarta.com



Gambar 3.2: Pramuka adalah salah satu organisasi kesiswaan




Gambar 3.3: Demonstrasi adalah salah satu contoh kemerdekaan mengeluarkan pendapat

## Tugas 3.1



Jelaskan pengertian organisasi dan berikan contoh organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah (masing-masing satu buah contoh). Tuliskan di selembar kertas folio. Untuk contoh organisasi, sertakan gambar yang bisa didapatkan dari surat kabar.

# B. Contoh-contoh Organisasi

## 1. Contoh Organisasi di Lingkungan Sekolah

Di dalam lingkungan sekolah, kamu bisa menemukan berbagai macam jenis organisasi. Mungkin, kamu termasuk di dalam organisasi tersebut. Sekolah pun termasuk sebuah organisasi. Sekolah adalah organisasi sosial yang bertujuan menyediakan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Di sekolah, kamu dapat menemukan struktur kepengurusan yang berjenjang. Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, komite sekolah, tata usaha, penjaga sekolah, juga para siswa. Setiap pengurus sekolah memiliki tugas dan kewajiban. Struktur kepengurusan di sekolah berbeda-beda. Tergantung ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut.

Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur jalannya kelancaran belajar dan mengajar. Kepala sekolah harus bekerja sama dengan wakilnya, komite sekolah, guru-guru dan siswa-siswa. Maka disusunlah tata tertib sekolah. Semua anggota dalam organisasi sekolah harus mematuhi tata tertib tersebut. Mereka pun memiliki hak dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar.

Sebagai siswa, berhak untuk mendapatkan pengajaran. Tanggung jawab siswa untuk patuh pada peraturan sekolah. Misalnya, hadir tepat waktu, tidak pernah membolos, menjaga lingkungan kelas, dan rajin belajar.

Sebagai guru, berhak untuk mendapatkan upah dari tugasnya mengajar. Guru bertanggung jawab mengajarkan ilmu dan pengetahuannya pada para siswa. Namun seorang guru tidak cukup hanya mengajar, dia juga harus mendidik para siswanya. Jika tugas mengajar bisa dilakukan di dalam ruangan kelas, maka tugas mendidik siswa semestinya dilakukan di dalam dan di luar lingkungan sekolah.

Para pekerja di sekolah selain kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru, juga memiliki hak dan tanggung jawab. Misalnya petugas tata usaha yang mengurus segala administrasi di sekolah. Penjaga sekolah tentu berkewajiban menjaga keamanan. Tukang kebun, tukang parkir bertugas sesuai kewajibannya. Semua memiliki hak mendapatkan upah atas pekerjaannya itu. Memiliki hak untuk mengemukakan pen-dapatnya jika terdapat perbedaan pendapat di antara seluruh ang-gota organisasi tersebut.

Sedangkan komite sekolah bersama guru dan kepala sekolah menyusun program sekolah. Komite sekolah pun bertugas menjaga keberlangsungan dan ketepatan program sekolah. Perwakilan orang-tua siswa adalah mereka yang diangkat menjadi komite sekolah.

Apabila ada anggota organisasi yang melanggar peraturan dan tata tertib di sekolah, mereka akan mendapat hukuman atau sanksi. Begitu pula jika yang melanggar adalah kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah.

Selain itu, di sekolah juga ada organisasi kesiswaan atau internal sekolah. Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS dibentuk di Sekolah Menengah Pertama dan Atas (SMP dan SMA). OSIS adalah organisasi yang dibentuk untuk menampung aspirasi siswa-siswi seluruh sekolah tersebut. OSIS adalah bagian dari sekolah dan menampung kegiatan kokurikuler ekstra dan kegiatan ekstra kulikuler yang menunjang kurikulum sekolah.

Seperti organisasi yang lainnya, setiap anggota OSIS memiliki hak dan tanggung jawab tersendiri, yaitu:

- **Hak anggota OSIS**

  a. Mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan siswa

  b. Memilih dan dipilih oleh anggota lain sebagai perwakilan kelas atau pengurus OSIS

  c. Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan

- **Kewajiban anggota OSIS**

  a. Memelihara nama baik dan kehormatan sekolah

  b. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah

  c. Menghormati guru, kepala sekolah, pengurus sekolah dan tenaga pendidik lainnya

  d. Memelihara sarana, prasarana, keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan sekolah

  e. Memelihara semangat persatuan dan kekeluargaan di sekolah

Organisasi yang lain yang biasanya ada di sekolah seperti kepanduan atau Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), koperasi siswa, sampai kegiatan siswa lainnya di sekolah pun bisa disebut sebagai organisasi.



Gambar 3.4: Pelantikan OSIS
OSIS adalah salah satu organisasi di sekolah

## Tugas 3.2



Ayo, bermain bersama. Ambil secarik kertas, tuliskan sebanyak-banyaknya organisasi kesiswaan di sekolah, berikut tugas masing-masing anggota organisasi itu. Contohnya, Pramuka. Ada kakak pembina yang bertugas dan seterusnya. Jika sudah, tukar dengan teman sebangkumu. Siapa yang paling banyak menuliskan organisasi kesiswaan di sekolah, dialah pemenangnya.

**Tahukah Kamu?**

**Serba-serbi Pramuka**

Pramuka atau Praja Muda Karana, dikenal pula dengan istilah kepanduan pertama kali dimulai pada tahun 1905 di Inggris. Ketika itu Robert Baden-Powell bersama rekannya William Alexander Smith mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Brownsea, Inggris. Lord Baden-Powell menulis buku Scouting For Boys (buku panduan kepramukaan edisi awal).

Gerakan Pramuka yang memfokuskan program untuk anak dan remaja usia 11 – 18 tahun ini memiliki tingkatan bagi para anggotanya, yaitu siaga, unit satuan karya dan penegak atau pandega.

## 2. Contoh Organisasi di Lingkungan Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia dalam wilayah tertentu yang mempunyai pandangan hidup serta budaya. Kalian adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat terdiri dari banyak manusia. Berbagai karakter manusia yang saling melengkapi satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia senantiasa membutuhkan manusia lainnya.

Untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, adil dan sejahtera maka dalam masyarakat pun dibentuk berbagai macam organisasi. Manusia tidak bisa berlaku seenaknya sendiri. Meski hidup merdeka, namun kemerdekaan itu dibatasi untuk menghormati hak manusia lainnya agar tidak ada yang merasa diperlakukan semena-mena.

Organisasi di lingkungan masyarakat berbeda jenis. Ada organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi olahraga, organisasi di lingkungan warga sekitar dan banyak lagi lainnya.

Coba perhatikan organisasi di lingkungan tempat tinggalmu. Ada Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), bahkan sampai tingkat kecamatan dan seterusnya. Bedanya, kalau kecamatan, kelurahan, dan kabupaten itu termasuk organisasi pemerintahan. Para pemimpinnya seperti camat, lurah, bupati, dan walikota digaji oleh pemerintah. Mereka menjadi wakil pemerintah untuk melayani warga. Sedangkan Ketua RT dan Ketua RW tidak digaji. Mereka dipilih oleh warga secara langsung.



Gambar 3.5: Organisasi olahraga
Sumber: www.kutaikartanegara.com

Selain organisasi di lingkungan tempat tinggalmu, ada pula organisasi untuk ibu-ibu yaitu Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan untuk para pemuda seperti Karang Taruna.

Organisasi di satu daerah biasanya memiliki ciri khas yang berlainan dengan organisasi dari daerah lainnya di Indonesia. Biasanya organisasi dibentuk untuk membantu para anggotanya.

Organisasi masyarakat berbentuk keagamaan pun mulai banyak bertebaran di Indonesia. Pengajian, dengan berbagai bentuk kegiatan dan penyelenggara banyak diikuti oleh tua dan muda.

**Tahukah Kamu?**

**Mengenal Organisasi Islam Nahdlatul Ulama**

Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama adalah salah satu organisasi Islam di Indonesia. Lebih dikenal dengan nama NU, organisasi ini didirikan pada tanggal 13 Januari 1926 (16 Rajab 1344 Hijriah). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Tujuan organisasi ini adalah menegakkan ajaran Islam menurut faham Ahlussunah wal jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekitar 40 juta jiwa rakyat diperkirakan menjadi basis pendukung NU di Indonesia.

Tempat bekerja seperti kantor, tempat berusaha berbentuk koperasi, yayasan dan sebagainya pun adalah organisasi.

## Tugas 3.3



Cobalah cari contoh-contoh organisasi di lingkungan masyarakat. Usahakan contoh tersebut disertai dengan wawancara singkat dengan anggota organisasi tersebut. Misalnya contoh organisasi tingkat RT, kamu bisa mewawancarai Ketua RT di lingkungan tempat tinggalmu. Pertanyaan yang diajukan seputar organisasi tersebut.

## C. Peran Serta Dalam Memilih Organisasi di Sekolah

Sebagai seorang siswa Sekolah Dasar, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam memilih organisasi di sekolah yang baik untukmu. Jika sedari kecil belajar berorganisasi, niscaya di masa depan akan banyak manfaat yang bisa didapatkan.

Dengan berorganisasi, kamu akan diajarkan cara mengeluarkan pendapat dengan benar, cara kepemimpinan, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara menjadi seorang bawahan, belajar bergaul, bagaimana mengatur organisasi dengan baik agar tujuan bersama dapat tercapai, dan masih banyak lagi. Yang harus diperhatikan adalah organisasi tersebut harus sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan minatmu. Misalnya

kamu senang menolong orang dan berpetualang ke alam, kamu bisa memilih untuk bergabung menjadi anggota pramuka. Jika kamu senang baris-berbaris dan ingin belajar cara mengibarkan bendera yang benar, kamu bisa ikut ke dalam Paskibra sekolahmu.



Gambar 3.6: Pemilihan pengurus kelas

Di sekolahmu ada organisasi yang bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi. Ya, organisasi kecil di kelasmu. Setiap tahun ajaran baru atau setelah libur semester, kelasmu akan mengadakan pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris kelas, bendahara kelas, dan banyak lagi jabatan lainnya. Di sanalah kamu bisa ikut berpartisipasi. Pemilihan pengurus kelas dilangsungkan dengan melibatkan semua siswa di kelas itu. Biasanya pemilihan ini diawasi oleh guru wali kelasmu. Teman-temanmu di kelas ada yang mencalonkan dirinya untuk menjadi pengurus kelas, ada pula yang dipilih atau ditunjuk langsung oleh siswa atau guru wali kelasmu. Mereka bertanggung jawab membuat suasana kelas nyaman dan aman untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu biasanya pengurus kelas memilih siswa-siswi di kelas itu untuk membantu mereka mengerjakan tugasnya. Dengan mengadakan piket per hari untuk mengurus kerapihan, kebersihan dan keindahan kelas. Sehingga kelas menjadi semakin menyenangkan untuk ditempati bersama.


Gambar 3.7: Peran serta kelas dalam kegiatan upacara

Jika kamu berkesempatan untuk mengikuti pemilihan pengurus kelas, tidak ada salahnya untuk mencalonkan diri agar kamu bisa belajar berorganisasi dari lingkup terkecil di sekolahmu, yaitu di ruang kelas.

Peran serta seluruh siswa-siswi di sekolah ketika memilih organisasi, baik untuk bergabung dengan organisasi tersebut, atau sekedar memberikan pendapat juga suaranya akan mempengaruhi kelancaran organisasi di sekolah.

Dukungan dan peran serta para siswa tersebut sangat dibutuhkan oleh organisasi. Baik ketika di dalam lingkungan sekolah atau pun di luar lingkungan sekolah.

### Tokoh Organisasi



Prof. Dr. Sirajuddin Syamsuddin, atau dikenal dengan Din Syamsuddin (Lahir: Sumbawa Besar, 31 Agustus 1958), adalah seorang politisi yang saat ini menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah periode 2005-2010.

Ia menempuh pendidikan sarjana di IAIN Jakarta, dan kemudian melanjutkan pascasarjana dan doktornya di University of California at Los Angeles (UCLA) di Amerika Serikat.Din pernah berkarir di birokrasi menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Binapenta Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Sedangkan dalam kegiatan organisasi, Beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPP Sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (1985), Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (1989-1993), Wakil Ketua PP Muhammadiyah (2000-2005), Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ketua Litbang Golongan Karya.

www.wikipedia.id.org

## Tugas 3.4



a. Tanyakan pada teman sebangkumu, peran serta apa yang telah dilakukannya dalam memilih organisasi di sekolahmu? Tanyalah secara bergantian.

### b. Isilah pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan pengertian dari organisasi!

2. Ada dua jenis organisasi. Sebutkan dan jelaskan!
3. Sebutkan ciri-ciri organisasi!
4. Berikan contoh dasar hukum kebebasan berorganisasi di Indonesia!
5. Jika organisasi sudah dibentuk, maka para anggotanya berhak untuk?
6. Berikan contoh organisasi di sekolah!
7. Berikan contoh organisasi di dalam masyarakat!
8. Apa tugas dan wewenang kepala sekolah?
9. Siapakah yang memilih ketua RT atau ketua RW?
10. Berikan contoh peran serta sebagai siswa dalam memilih organisasi di sekolah!

## c. Diskusikan

Di sekolahmu telah terbentuk komite sekolah yang terdiri dari para orangtua siswa. Ketika pemerintah mengumumkan dana BOS (bantuan untuk sekolah), menurutmu apa yang harus dilakukan oleh komite sekolah mengenai dana BOS ini? Diskusikan dengan teman sekelas.

## Rangkuman

1. Organisasi adalah himpunan, atau perkumpulan orang-orang yang mempunyai dasar dan tujuan tertentu yang sama.
2. Organisasi ada yang berbentuk di bawah pemerintahan atau di luar pemerintahan yang disebut organisasi non pemerintah.
3. Ciri-ciri organisasi yaitu, memiliki struktur yang jelas dan tersusun, melibatkan banyak orang, setiap orang yang tergabung dalam organisasi wajib mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama, memiliki cita-cita dan tujuan atau visi dan misi yang sama.
4. UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang" adalah dasar hukum mengenai kemerdekaan berorganisasi secara tertulis.
5. Contoh organisasi di sekolah misalnya OSIS, Pramuka, PMR (Palang Merah Remaja), dan lain-lain.
6. Setiap pemegang jabatan di dalam organisasi memiliki hak dan tanggung jawab.
7. Apabila ada anggota organisasi yang melanggar peraturan bersama, ada sanksi atau hukuman yang diberikan.
8. Organisasi di lingkungan masyarakat beragam banyaknya. Ada organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan banyak lagi.
9. Banyak manfaat yang bisa didapatkan jika belajar berorganisasi. Misalnya belajar kepemimpinan, belajar cara mengemukakan pendapat dan lain-lain.
10. Peran serta seluruh siswa dibutuhkan demi kemajuan organisasi sekolah.

# Uji Kompetisi

**A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar di bawah ini!**

1. Organisasi adalah himpunan atau sekelompok orang yang ....
   a. memiliki karakter yang sama
   b. berasal dari satu keluarga
   c. mempunyai dasar dan tujuan tertentu yang sama
   d. memiliki harta kekayaan yang sama

2. Organisasi pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah organisasi yang memiliki ....
   a. struktur kepengurusan yang jelas dan tersusun
   b. struktur kepengurusan yang sama, semua anggota bertugas memeriksa keuangan
   c. struktur kepemimpinan dan bawahan tidak jelas
   d. struktur kepemimpinan tertata

3. Republik Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk berorganisasi. Hak tersebut ditegaskan dalam pasal ....
   a. pasal 27 Ayat 2, Amandemen
   b. pasal 29 Ayat 1
   c. pasal 28E Ayat 3
   d. pasal 30, Amandemen

4. Contoh unit organisasi terkecil di sekitarmu, dan kamu termasuk sebagai anggotanya adalah ....
   a. sekolah
   b. Rukun Tetangga
   c. Rukun Warga
   d. keluarga

5. Di sekolah, kamu dapat menemukan struktur kepengurusan yang berjenjang. Struktur kepengurusan di sekolah berbeda-beda. Hal itu tergantung dari ....
   a. ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut
   b. kebijakan komite sekolah di sekolah tersebut
   c. peraturan pemerintah mengenai pendidikan
   d. kepemimpinan kepala sekolah

6. Berikut ini kewajiban seorang siswa di sekolah, kecuali ....
   a. tidak pernah membolos, kecuali jika berhalangan hadir karena sakit atau keperluan lain
   b. menjaga kebersihan kelas bersama-sama teman
   c. mematuhi perintah guru
   d. jajan di sekolah agar bisa kuat dalam bermain bola sepulang sekolah

7. Organisasi kesiswaan diadakan agar para siswa dapat belajar ....
   a. berorganisasi sejak kecil
   b. bekerjasama dengan para guru
   c. mandiri dan peduli pada sesama
   d. menghemat keuangan

8. Manusia adalah mahluk sosial sehingga tidak bisa hidup dengan baik tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Organisasi dibentuk agar hidup manusia ....
   a. semakin kaya dan mampu membeli berbagai macam barang
   b. saling memahami karakter manusia lainnya
   c. tenteram, adil dan sejahtera karena masing-masing pihak tahu hak dan kewajibannya
   d. seenaknya sendiri, tidak pedulikan orang lain

9. Organisasi yang dibentuk dan ditujukan agar ibu-ibu dapat berperan aktif di lingkungan tempat tinggalmu, yaitu ....
   a. Karang Taruna
   b. DKM Masjid
   c. Posyandu
   d. Koperasi Karyawan

10. Peran serta dalam organisasi di sekolahmu adalah ....
    a. memilih ketua kelas yaitu teman yang dekat denganmu
    b. menyarankan agar ketua Paskibraka dijabat oleh anak yang paling cantik di sekolah
    c. mengikuti saran gurumu agar memilih anak yang paling cerdas sebagai ketua OSIS
    d. memilih ketua kelas, ketua OSIS atau kepala organisasi siswa lainnya berdasarkan keahlian dan kemampuan mereka semata

## B. Jawaablah pertanyaan berikut ini!

1. Apakah negara termasuk organisasi? Jelaskan pendapatmu
2. Jelaskan ciri-ciri sebuah organisasi
3. UUD 1945 memberikan jaminan pada warga negara Indonesia untuk berorganisasi. Sebutkan pasal yang mencantumkannya
4. Guru, sebagai bagian dari organisasi sekolah memiliki hak dan kewajiban. Jelaskan
5. Menyambut 17 Agustus tahun ini, Karang Taruna di daerahmu akan mengadakan berbagai macam lomba. Apakah kamu ingin ikut berpartisipasi? Jelaskan manfaat yang didapatkan Karang Taruna dengan membuat lomba-lomba seperti ini

## c. Isilah titik-titik di bawah ini

1. Organisasi adalah ... yang mempunyai ... sama.
2. Organisasi tidak bisa ... jika orang-orang di ... tidak ... dengan baik.
3. Sekolah adalah ... yang bertujuan ... untuk ....
4. Partai Golkar, PDIP, PPP, PKS, dan PAN adalah contoh ....
5. Yang harus kamu perhatikan adalah ... jika ikut berperan serta memilih organisasi di sekolah.

## D. Tugas

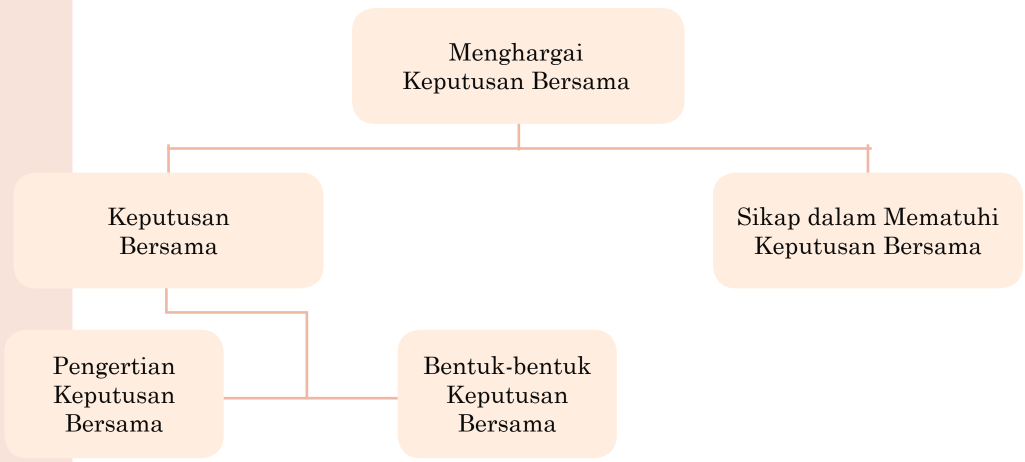
**Isilah tabel di bawah ini!**
**Lihat contoh berikut!**

| No | Nama | Ya | Tidak | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | Oganisaasi | | Organisasi Pemerintah |
| 2 | Partai Keadilan Sejahtera | | | |

| No | Nama | Ya | Tidak | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pos Pelayanan Terpadu | | | |
| 4 | Kecamatan | | | |
| 5 | Pasar | | | |
| 6 | Taman Kanak-kanak | | | |
| 7 | Perhimpunan Wali Gereja | | | |
| 8 | ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim) | | | |
| 9 | PT. Telkom, Tbk | | | |
| 10 | Muhammadiyah | | | |

# Bab 4 Sikap Menghargai Keputusan Bersama

## Peta Konsep




## Kompetensi Dasar

1. Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama.
2. Mematuhi keputusan bersama.

## Kata Kunci

- Perbedaan
- Karakter
- Mufakat
- Keputusan
- Manusia
- Kepentingan
- Bersama
- Musyawarah
- Sikap

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam latar belakang suku, daerah dan agamanya. Meski berbeda, terbukti bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terjalin erat. Manusia berbeda keinginan dan pemahamannya, oleh karena itu dibutuhkan sebuah keputusan mengenai berbagai hal yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keputusan bersama itu sepatutnya menjadi perhatian seluruh elemen bangsa dan dipatuhi bersama. Untuk itu, kalian dapat belajar mengenai bentuk-bentuk kepatuhan bersama.

# A. Keputusan Bersama

## 1. Pengertian Keputusan Bersama

Apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Di dalam masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam karakter manusia, tentunya terdapat perbedaan-perbedaan mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar masyarakat tersebut. Keputusan bersama adalah hasil kompromi dari hal-hal yang harus diputuskan oleh wakil-wakil masyarakat itu.

Keputusan bersama dihasilkan melalui cara-cara umum yang dikenal masyarakat. Keputusan bersama itu merupakan ketentuan, ketetapan serta penyelesaian yang dilakukan wakil masyarakat atau sekelompok orang mengenai sesuatu hal.



Gambar 4.1: Konferensi untuk mencapai kesepakatan bersama

Keputusan bersama dibuat agar tidak terjadi perselisihan atau perdebatan berkepanjangan di dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Semua pihak ketika menghasilkan keputusan bersama harus mematuhi apa yang tertera sebagai kesepakatan bersama tersebut. Hal itu mengikat semua pihak.

Pengambilan keputusan bersama berbeda dengan pengambilan keputusan pribadi atau perorangan. Karena melibatkan banyak orang, dengan banyak kepentingan pula.

Dalam demokrasi Pancasila, azas musyawarah untuk mufakat dan semangat kekeluargaanlah yang menjadi dasar pengambilan keputusan bersama.

Jika sudah terbiasa memutuskan sesuatu bersama-sama demi kepentingan dan kebaikan semua pihak, niscaya tidak ada lagi peperangan atau konflik yang menimbulkan perpecahan dalam tatanan masyarakat.

Di dalam proses pengambilan keputusan bersama itu, setiap pihak diharapkan memiliki sifat terbuka untuk menerima masukan dan kritik dari pihak lain, bertenggang rasa atau tidak egois, tidak ingin memaksakan pendapatnya atau mau menang sendiri, dan menyampaikan ide-idenya dengan sopan dan berperilaku santun, serta selalu menghormati semua pihak.

**Tahukah Kamu?**

**Hak Veto DK PBB**

Salah satu bentuk keputusan bersama yang harus ditaati oleh segenap anggota organisasi adalah hak veto. Hak veto adalah hak untuk menggagalkan atau melarang secara mutlak suatu keputusan. Hak ini diberikan kepada penguasa atau anggota tertentu suatu organisasi seperti yang diberikan kepada kelima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kelima anggota itu antara lain China, Rusia, Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Mereka adalah negara-negara yang menjadi pemenang pada Perang Dunia kedua tahun 1945.

## Tugas 4.1



Tuliskan pengertian keputusan bersama menurutmu di secarik kertas

## 2. Bentuk-bentuk Keputusan Bersama

Bentuk keputusan bersama yang telah menjadi budaya bangsa Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat. Mufakat adalah bentuk keputusan bersama, hasil dari proses bermusyawarah.

Musyawarah adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi dalam satu kelompok organisasi, pemerintah atau non pemerintah. Menurut Kamus Bahasa Indone-sia, musyawarah berarti berunding atau berembuk.

Bentuk keputusan bersama bisa pula dihasilkan melalui voting atau pengambilan keputusan lewat suara terbanyak. Pemilihan Umum adalah bentuk mendapatkan keputusan bersama untuk memilih wakil-wakil rakyat. Meski tidak bisa seratus persen sama persis, namun hal ini bisa menjadi jalan untuk membuat semua pihak merasa lega dan menerima keputusan tersebut.

Rapat, berdialog di antara pihak yang berbeda pendapat, sidang-sidang pada lembaga pemerintahan dan bentuk-bentuk musyawarah lainnya pada dasarnya akan menghasilkan keputusan bersama yang dapat diterima semua pihak.

Keputusan bersama memiliki tujuan agar tercipta rasa tenteram dan ketertiban di antara masyarakat.

**Tahukah Kamu?**

**Bermusyawarah**

Rakyat Indonesia adalah rakyat yang sudah lama mengenal musyawarah sebagai salah satu cara mendapatkan keputusan bersama. Dengan musyawarah perbedaan-perbedaan yang tadinya belum atau tidak bisa disepakati bersama akan mencapai titik temu.

Musyawarah diambil dari bahasa Arab, yang berarti membahas bersama-sama suatu masalah untuk mencapai keputusan (atau mufakat).

## Tugas 4.2



Sebutkan contoh bentuk keputusan bersama yang dapat menghasilkan kata sepakat bagi semua pihak, jelaskan

## B. Sikap Dalam Mematuhi Keputusan Bersama

Banyak sekali keputusan bersama yang telah dihasilkan di dalam lingkungan masyarakat. Misalnya peraturan lalu lintas, seperti dilarang menyeberang jalan sembarangan, keharusan pemakaian helm bagi para pengguna motor dan contoh lainnya.

Sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara yang baik, kamu pun harus mematuhi keputusan bersama tersebut. Apalagi tujuan dari keputusan bersama itu bermanfaat bagi semua pihak.

Di lingkungan sekolah, sebagai seorang siswa sudah sepantasnya mematuhi tata tertib sekolah mengenai jam masuk dan keluar sekolah. Kamu harus tepat waktu sampai di sekolah. Misalnya sekolahmu masuk pukul 06.45, maka kamu sudah berada di sekolah jam 06.00 atau paling lambat jam 06.30.

Jika hasil keputusan bersama itu dilanggar, maka ada sanksi yang berlaku. Seperti di sekolah, jika kamu terlambat masuk sekolah, guru piket atau penjaga sekolah tidak langsung memperbolehkanmu untuk masuk. Kamu harus menunggu jam pelajaran berikutnya, atau dihukum di ruang guru dan sanksi-sanksi lainnya. Tiap sekolah memiliki perbedaan pelaksanaan keputusan bersama begitu pula dengan sanksi yang diberikan bagi mereka yang tidak mematuhi keputusan bersama itu.



Gambar 4.2: Melaksanakan piket kebesihan ciri menghargai keputusan bersama

Berikut ini sikap di dalam mematuhi keputusan bersama, antara lain:

- Bersikap Menghargai, karena proses untuk menghasilkan keputusan bersama melalui waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak sudah semestinya kita menghargai keputusan bersama itu.
- Bersikap Taat, artinya segala keputusan bersama itu dipatuhi dengan baik apapun konsekuensinya.
- Bersikap Bijaksana, kadang ada hasil keputusan bersama yang kurang disukai dan dipahami oleh kamu. Dibutuhkan sikap bijaksana untuk mematuhi keputusan bersama itu.

- Bersikap tenggang rasa, setiap orang memiliki cara yang berbeda di dalam melaksanakan hasil keputusan bersama itu. Kamu harus bisa bertenggang rasa dengan adanya perbedaan tersebut.

Jika hasil keputusan bersama itu dilaksanakan berdasarkan azas kekeluargaan, maka dapat menciptakan kehidupan yang rukun penuh kasih sayang, mempererat persatuan bangsa dan menumbuhkan jiwa saling menolong.

**Tahukah Kamu?**

### Pemilu

Pemilu atau Pemilihan Umum adalah pesta demokrasi rakyat Indonesia yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu adalah salah satu bentuk atau cara untuk mengambil keputusan bersama.

Pemilu diadakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPRD, dan DPD. Setelah itu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pun dilakukan.

Partai pemenang Pemilu harus mematuhi keputusan bersama atau hasil pemilu yang dipilih oleh rakyat secara langsung dengan sikap baik.

## Tugas 4.3



a. Buatlah kliping yang berisi gambar perilaku masyarakat dalam mematuhi keputusan bersama. Misalnya gambar penyeberang jalan yang menyeberang di tempat yang semestinya, membuang sampah di tempatnya dan sebagainya. Minimal berisi 10 gambar, berikan keterangan.

### b. Isilah pertanyaan di bawah ini

1. Jelaskan arti dari pengertian keputusan bersama!
2. Mengapa keputusan bersama harus dibuat?
3. Di dalam pengambilan keputusan bersama, pihak-pihak yang ikut berperan harus bersikap?

4. Sebutkan bentuk-bentuk keputusan bersama di Indonesia!
5. Jelaskan sikap-sikap dalam mematuhi keputusan bersama!

## C. Diskusikan

Bentuklah kelompok yang terdiri dari empat atau enam orang siswa di kelas. Diskusikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keputusan bersama. Misalnya alasan keputusan bersama dihasilkan, bentuk, sikap dan lain sebagainya. Setiap anak harus mengemukakan pendapatnya.



Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA, lahir di Klaten 8 April 1960. Ia selain dikenal sebagai Ketua MPR RI adalah ustadz dan cendikiawan. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan

Beliau pernah menjadi santri di Pesantren Modern Gontor, lalu melanjutkan studi ke Madinah. Di kota suci umat Islam ini beliau menempuh pendidikan hingga jenjang S3.

Sepulang dari Madinah, beliau berdakwah di tanah air sebelum terjun di dunia politik tahun 1999.

MPR RI adalah lembaga pemerintahan yang banyak melakukan musyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama bagi kebaikan bangsa dan negara.

Sumber: httpwww.eramuslim.com

## Rangkuman

1. Keputusan bersama adalah hasil kompromi dari hal-hal yang harus diputuskan oleh wakil-wakil masyarakat.
2. Keputusan bersama dihasilkan melalui cara-cara umum yang dikenal masyarakat.
3. Keputusan bersama itu merupakan ketentuan, ketetapan serta penyelesaian yang dilakukan wakil masyarakat atau sekelompok orang mengenai sesuatu hal.
4. Keputusan bersama dibuat agar tidak terjadi perselisihan atau perdebatan berkepanjangan di dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.
5. Di dalam proses pengambilan keputusan bersama, setiap pihak diharapkan memiliki sifat terbuka untuk menerima masukan dan kritik dari pihak lain, bertenggang rasa atau tidak egois, tidak ingin memaksakan pendapatnya atau mau menang sendiri, dan menyampaikan ide-idenya dengan sopan dan berperilaku santun, serta selalu menghormati semua pihak.
6. Musyawarah adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat atau satu kelompok organisasi.
7. Rapat, berdialog, sidang-sidang pada lembaga pemerintahan, serta bentuk-bentuk musyawarah lainnya pada dasarnya akan menghasilkan keputusan bersama yang dapat diterima semua pihak.
8. Sikap di dalam mematuhi keputusan bersama, antara lain bersikap menghargai, taat, bijaksana, dan bertenggang rasa.

## Uji Kompetisi

**A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar di bawah ini!**

1. Maksud dari keputusan bersama adalah ....
   a. cara-cara umum yang dikenal masyarakat
   b. ketentuan, ketetapan serta penyelesaian yang dilakukan wakil masyarakat atau sekelompok orang mengenai sesuatu hal
   c. budaya masyarakat Indonesia
   d. melibatkan banyak orang

2. Dasar pengambilan keputusan bersama adalah ....
   a. UUD 1945
   b. semangat kekeluargaan
   c. azas musyawarah dan mufakat serta semangat kekeluargaan
   d. Tap MPR

3. Keputusan bersama dibuat, agar ....
   a. tidak terjadi diskriminasi
   b. rakyat menjadi makmur
   c. pemerintah diuntungkan
   d. tidak terjadi perselisihan atau perdebatan berkepanjangan

4. Di dalam proses pengambilan keputusan bersama, setiap pihak diharapkan memiliki hal-hal di bawah ini, kecuali ....
   a. selalu menghormati semua pihak
   b. bertenggang rasa atau tidak egois
   c. mengkritik dengan kasar
   d. tidak ingin memaksakan pendapatnya

5. Apa itu musyawarah ....
   a. bentuk keputusan bersama
   b. cara menghasilkan keputusan bersama
   c. perselisihan pendapat
   d. menciptakan rasa tenteram

6. Mufakat adalah hasil dari ....
   a. dialog
   b. pemilu
   c. voting
   d. musyawarah

7. Pemilihan umum adalah salah satu ....
   a. contoh demokrasi
   b. bentuk keputusan bersama
   c. cara memilih rakyat
   d. manfaat hasil voting

8. Sebagai seorang siswa di sekolahmu, jika kamu tidak mematuhi keputusan bersama, maka yang akan kamu dapatkan adalah ....
   a. cacian
   b. pujian
   c. hukuman
   d. cemoohan

## B. Jawablah pertanyyan berikut ini!

1. Jelaskan pengertian dari keputusan bersama!
2. Budaya Indonesia memiliki cara pengambilan keputusan bersama yang sudah dipraktikkan sejak zaman dulu. Jelaskan!
3. Sikap seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk mematuhi keputusan bersama?

## C. Isilah titik-titik di bawah ini

1. Di dalam masyarakat ... yang terdiri dari berbagai macam ... manusia, terdapat ...mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar masyarakat.
2. Pengambilan keputusan bersama berbeda dengan pengambilan keputusan ... karena ... dengan banyak ....
3. Keputusan bersama memiliki ... agar tercipta rasa ... dan ... di antara masyarakat.

## D. Tugas

**Isilah tabel di bawah ini!**

| No | Bentuk Keputusan Kersama | Sikap | Setuju | Tidak Setuju |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masyarakat di desamu bermusyawarah untuk memilih kepala desa. Mufakat pun tercapai. Pak Isa, tetangga sebelah rumahmu yang terkenal berjiwa sosial terpilih | Menghargai keputusan itu. Kamu sendiri pun kagum akan sifat-sifat yang dimiliki pak Isa | | |
| 2 | Kamu bergabung dengan organisasi siswa di sekolah. Hari ini akan diadakan rapat untuk menetapkan acara menyambut 17 Agustus nanti. Kamu termasuk salah satu anggota rapat | Mengemukakan pendapatmu jika ditanya saja. Bersikap tidak peduli dengan keputusan bersama itu | | |
| 3 | Gurumu meminta pendapat siswa-siswi di kelasmu tentang rencana kunjungan berdarma wisata ke luar kota. Terjadi perbedaan pendapat kota apa yang sebaiknya dikunjungi | | | |
| 4 | Pemilihan Ketua Kelas dengan cara voting menghasilkan dua calon yang suaranya sama kuat. Musyawarah pun dilakukan. | | | |
| 5 | Guru-guru di sekolah sedang berdialog untuk membicarakan tata cara ujian kelas VI SD. Banyak kelas diminta untuk belajar sendiri. | | | |

# Uji Kompetensi Semester 2

**A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar di bawah ini!**

1. Organisasi adalah himpunan orang-orang yang memiliki ....
   a. prinsip hidup yang sama
   b. latar belakang yang sama
   c. dasar dan tujuan tertentu yang sama
   d. komunikasi yang sama

2. Organisasi memiliki struktur yang jelas dan tersusun. Struktur tersebut menjelaskan tentang ....
   a. hak dan kewajiban para anggotanya
   b. lingkungan dalam organisasi
   c. visi dan misi organisasi
   d. contoh pengambilan keputusan

3. Republik Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk berorganisasi. Hal itu dijamin secara hukum melalui UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3, yang berbunyi ....
   a. setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
   b. kebebasan mendapatkan informasi yang benar dan akurat serta menyampaikannya kembali kepada manusia lainnya
   c. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh dalam memberikan keterangan sesuai tugasnya
   d. setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. Jenjang kepungurusan organisasi yang sekolahmu adalah ....
   a. guru, wali kelas, murid, kepala sekolah, komite sekolah
   b. komite sekolah, pengurus TU, administrasi sekolah, guru
   c. siswa, guru, komite sekolah, kepala sekolah
   d. kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengurus TU, penjaga sekolah, siswa.

5. Di sekolah pun ada organisasi kesiswaan atau internal sekolah, beberapa organisasi tersebut antara lain, kecuali ....
   a. Palang Merah
   b. Osis
   c. Paskibraka
   d. Karang Taruna

6. Organisasi di lingkungan masyarakat sangat beragam jenisnya. Beberapa organisasi tersebut yaitu, kecuali ....
   a. organisasi politik
   b. organisasi olahraga
   c. organisasi pada lembaga negara
   d. organisasi sosial kemasyarakatan

7. Semua orang dapat mengikuti organisasi yang diinginkannya. Yang harus diperhatikan adalah organisasi yang memilki siat-sifat ....
   a. bertentangan dengan bakatmu
   b. sesuai dengan kebutuhan dan minatmu
   c. banyak orang yang satu suku denganmu
   d. auh dari lingkungan tempat tinggalmu

8. Keputusan bersama itu merupakan ... yang dilakukan wakil masyarakat atau sekelompok orang mengenai sesuatu hal.
   a. perselisihan dan perbedaan pendapat
   b. hak dan kewajiban
   c. pengambilan keputusan pribadi
   d. ketentuan, ketetapan serta penyelesaian

9. Setiap pihak harus memiliki sifat tenggang rasa, tidak memaksakan pendapatnya, menyampaikan ide dengan sopan, dan lain-lain. Hal itu adalah syarat ....
   a. proses pengambilan keputusan
   b. keadaan yang dinginkan
   c. demokrasi terpimpin
   d. bentuk keputusan bersama

10. Bentuk keputusan bersama bisa pula dihasilkan melalui, kecuali dengan cara ....
    a. Pemilihan Umum
    b. rapat
    c. voting
    d. pemaksaan kehendak

11. Jika hasil keputusan bersama tersebut dilanggar, maka hal yang patut diterima adalah ....
    a. sanksi
    b. pertemuan mendadak
    c. disiplin
    d. agresi militer

12. Salah satu sikap yang harus dimiliki dalam mematuhi keputusan bersama adalah bersikap menghargai karena ....
    a. banyak waktu terbuang percuma dalam menghasilkan keputusan bersama, maka sayang kalau tidak dihargai
    b. semua pihak yang berperan dalam proses pengambilan keputusan menghargainya
    c. keluarga, teman sejawat dan semua orang yang kamu kenal pun menghargainya.
    d. proses untuk menghasilkan keputusan bersama melalui waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak

## B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan pengertian organisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia!
2. Apakah organisasi melibatkan banyak orang? Jelaskan alasanmu!
3. Sebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah!
4. Sebutkan contoh organisasi di lingkungan masyarakat!
5. Apakah kamu berperan serta dalam memilih organisasi di sekolah? Sebutkan organisasi yang kamu ikuti!
6. Keputusan bersama dihasilkan melalui cara-cara seperti?
7. Jelaskan bentuk keputusan bersama yang kamu ketahui!
8. Berikan contoh sikap dalam mematuhi keputusan bersama!

## C. Tugas Mandiri

Banyak sekali contoh organisasi di sekitarmu. Buatlah laporan singkat tentang organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Masing-masing satu contoh organisasi. Berikut sejarah organisasi dan struktur susunan para pengurusnya.

## D. Tugas Kelompok

**Permainan Peran**

Bentuk kelompok yang terdiri dari enam orang siswa. Bayangkan kalian adalah anggota sebuah organisasi yang sedang mengadakan rapat untuk menghasilkan keputusan bersama.

Satu orang siswa berperan sebagai kepala organisasi, satu orang lainnya menjadi wakil ketua. Satu orang berikutnya berperan sebagai sekretaris sekaligus notulen (penulis) rapat. Dua orang lainnya berperan sebagai anggota.

Rapat dijadwalkan selama sepuluh menit. Ingat, di dalam pengambilan keputusan semua anggota harus bersikap sopan, tidak egois, dan saling menghargai pendapat orang lain. Jika keputusan bersama tersebut sudah disepakati, tugas notulen untuk mencatat hasil keputusan tersebut. Selamat bermain.

# Uji kompetensi Akhir Tahun

**A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar di bawah ini!**

1. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk negara ....
   a. negara kerajaan
   b. negara kesatuan
   c. negara federal
   d. negara parlementer

2. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) yang diresmikan tanggal 28 Mei 1945 ini ditugaskan oleh Jepang untuk ....
   a. memilih pemimpin negara Indonesia yang akan merdeka
   b. menentukan dasar negara
   c. memuluskan jalan bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaan
   d. mempelajari hal-hal yang dibutuhkan oleh negara yang baru merdeka

3. BPUPKI memiliki ... anggota. Badan ini diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat.
   a. 19 orang
   b. 35 orang
   c. 63 orang
   d. 8 orang

4. Berikut ini nama anggota yang mengajukan usul mengenai dasar negara, kecuali ....
   a. Ir. Soekarno
   b. Prof Dr. Soepomo
   c. Drs. Mohammad Hatta
   d. Mr. Mohammad Yamin

5. Usulan tertulis dari anggota ini hampir sama persis dengan Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Orang yang mengusulkan dasar negara dengan isi yang persis seperti itu adalah ....
   a. Dr. Kusumah Atmadja
   b. K.H.Dewantara
   c. Mr. Moh. Yamin
   d. Dr. Radjiman Wediodiningrat

6. Pada tanggal berapa tugas BPUPKI selesai pada ....
   a. 19 Agustus 1945
   b. 10 Juli 1945
   c. 16 Juli 1945
   d. 7 Agustus 1945

7. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar negara Republik Indonesia. UUD 1945 telah beberapa kali diamandemen. Berikut ini tanggal amandemen UUD 1945, kecuali ....
   a. 11 Agustus 2002
   b. 10 Oktober 2001
   c. 18 Agustus 2000
   d. 19 Oktober 1999

8. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, menurut UUD 1945 pasal ....
   a. Pasal 5 ayat 2
   b. Pasal 1 ayat 1
   c. Pasal 1 ayat 2
   d. Pasal 3 ayat 5

9. Perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya berhasil karena ....
   a. politik adu domba jepang tidak bisa meruntuhkan semangat para pejuang
   b. kekosongan kekuasaan sehingga memudahkan indonesia memproklamirkan kemerdekaannya
   c. pemberian tentara sekutu
   d. rasa persatuan dan kesatuan serta perjuangan tak kenal lelah

10. Maksud dengan negara kesatuan adalah ....
    a. negara yang seluruh rakyatnya bersatu
    b. negara yang memiliki pemerintahan pusat untuk mengatur keseluruhan wilayahnya
    c. negara yang terdiri dari kumpulan negara bagian
    d. negara yang setiap negara bagiannya dapat memiliki hukum dasar tersendiri

11. Jumlah provinsi di negara kesatuan RI ini adalah ....
    a. 35 provinsi
    b. 31 provinsi
    c. 40 provinsi
    d. 33 provinsi

12. Wilayah laut atau perairan laut Indonesia dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan Konversi Hukum Laut Internasional tahun 1982, yaitu ....

a. batas laut konvensional, batas daratan, batas laut internasional
b. batas laut kontinen, zona ekonomi ekslusif, batas laut teritorial
c. batas daratan, batas kepulauan, batas wilayah
d. batas laut kontinen, batas daratan, zona ekonomi ekslusif

13. Ancaman terhadap keutuhan negara bisa datang dari dalam dan dari luar. Berikut ini salah satu ancaman dari dalam, yaitu ....
    a. kebebasan mengemukakan pendapat mengakibatkan berseterunya dua golongan
    b. perbedaan ras, suku bangsa dan agama
    c. keadilan yang dilaksanakan oleh pemerintah
    d. separatisme wilayah

14. Beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki gerakan atau kelompok separatisme, kecuali ....
    a. DKI Jakarta
    b. Maluku
    c. Papua
    d. Nangroe Aceh Darussalam

15. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat pertahanan negara yang bertugas untuk ....
    a. melindungi para pemimpin negara
    b. mengawasi daerah rawan separatisme
    c. menegakkan kedaulatan pemerintahan
    d. mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia

16. Berikut ini perilaku yang dapat kamu lakukan sebagai seorang siswa untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara adalah ....
    a. belajar seperti yag diperintahkan bapak atau ibu guru meski tidak semaksimal mungkin
    b. berteman dengan semua orang di kelasmu tanpa membeda-bedakan
    c. mengikuti kegiatan upacara bendera atau hari besar kenegaraan hanya jika diabsen oleh guru
    d. mendukung upaya pemerintah untuk menangkap pkelompok separatisme dengan kekuatan senjata

17. Menurut UUD 1945 Pasal ... Ayat ... negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Isilah titik-titik di atas
    a. pasal 1 Ayat 1
    b. pasal 4 Ayat 1
    c. pasal 2 Ayat 3
    d. pasal 1 Ayat 3

18. Maksud dari peraturan perundang-undangan adalah ....
    a. hukum yang dikenal secara lisan dan tulisan di suatu negara
    b. hukum yang dibuat secara tertulis yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat di negara tersebut
    c. hukum yang menjadi landasan bagi kegiatan pemerintahan
    d. hukum yang dibuat menurut keinginan penguasa

19. Undang-undang terbagi atas dua macam, yaitu ....
    a. undang-undang tertulis dan undang-undang tersusun
    b. undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti material
    c. undang-undang dalam negeri dan undang-undang luar negeri
    d. undang-undang tingkat tertentu dan undang-undang tingkat tinggi

20. Berikut ini manfaat dari pada peraturan perundang-undangan, kecuali ....
    a. menjaga ketertiban di tengah masyarakat
    b. mengamankan wilayah negara Republik Indonesia
    c. memberikan kepastian hukum bagi warga negara
    d. memberikan rasa aman pada para pelanggar peraturan

21. Pancasila sebagai sumber hukum dapat ditemukan pada ....
    a. Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945
    b. Peraturan pemerintah
    c. Tap MPR No. II/MPR/2000
    d. Keputusan Presiden

22. Perbedaan antara tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 dan Undang-undang No.10. tahun 2004 adalah ....
    a. tidak mencantumkan Undang-undang
    b. tidak mencantumkan Tap MPR
    c. tidak mencantumkan Peraturan Daerah
    d. tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

23. Peraturan Pemerintah dibuat untuk memudahkan pelaksanaan atau perintah undang-undang. Contoh peraturan pemerintah ialah ....
    a. peraturan tentang Lembaga Negara seperti BPK
    b. pasal 27
    c. UU RI mengenai tindak pidana korupsi
    d. Tap MPR RI No. IV/MPR/2001

24. Contoh peraturan perundangan di tingkat pusat seperti di bawah ini, kecuali ....
    a. peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    b. peraturan Kepala LPND/Komisi/Badan
    c. peraturan Menteri (Permen)
    d. peraturan Desa (Perdesa)

25. Peraturan Daerah Kota Bandung No ... Tahun ... Pasal 41c tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Kota.
    a. Nomor 14 Tahun 2005
    b. Nomor 03 Tahun 2005
    c. Nomor 01 Tahun 2004
    d. Nomor 29 Tahun 2007

26. Berikut ini contoh peraturan perundang-undangan mengenai anti korupsi kecuali ....
    a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2006
    c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
    d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

27. Maksud dari PPN (Pajak pertambahan nilai) adalah ....
    a. pajak yag dikenakan ketika kita melintasi jalan tol
    b. pajak yang diperuntukkan bagi rumah dan bangunan serta tanah
    c. pajak yang dikenakan ketika membawa barang-barang keluar negeri
    d. pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen.

28. Menurut data lembaga non pemerintah, Indonesia termasuk negara dengan tingkat korupsi yang ....
    a. sedang-sedang saja
    b. tidak terlalu parah
    c. sangat parah
    d. cukup baik

29. Organisasi adalah perhimpunan atau perkumpulan yang memiliki kesamaan dalam ....
    a. suku dan bangsa
    b. latar belakang
    c. sejarah
    d. dasar dan tujuan tertentu

30. Berikut ini penjelasan mengenai organisasi kecuali ....
    a. organisasi memiliki struktur yang jelas dan tersusun
    b. organisasi dapat dikatakan sebagai suatu kerjasama berdasarkan pembagian kerja yang telah ditetapkan
    c. organisasi melibatkan satu orang saja
    d. organisasi memiliki satu cita-cita dan tujuan yang sama

31. Organisasi dapat dibedakan menurut visi dan misinya seperti di bawah ini, kecuali ....
    a. organisasi yang sebidang
    b. organisasi yang seagama
    c. organisasi yang sefungsi
    d. organisasi yang sejajar

32. Dasar hukum organisasi menurut UUD 1945 pasal ... ayat ... yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".
    a. 28A ayat 3
    b. 28E ayat 3
    c. 27 ayat 2
    d. 28 F

33. Beberapa Undang-undang tentang kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat, antara lain ....
    a. UU RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
    b. UU RI No. 30 tahun 2001 tentang partai politik
    c. UU RI No. 19 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
    d. UU RI No. 32 tahun 2002 tentang kebebasan pers

34. Sebutkan beberapa organisasi di sekolah, yaitu ....
    a. Pramuka,OSIS, PMR, Karang Taruna
    b. Paskibraka, Tim Basket, OSIS, PKK
    c. PMR, Pramuka, IDI, Ikapi
    d. Tim Sepakbola sekolah, Pramuka, Koperasi Siswa, PMR

35. Organisasi di lingkungan masyarakat, yaitu ....
    a. PKK, RT, RW, Karang Taruna
    b. Posyandu, IDI, PMR, Ikapi
    c. Paskibraka, RT, Karang Taruna, Perhumas
    d. Persib, Pramuka, NU, PKK

36. Mengikuti suatu organisasi membuat kamu belajar banyak hal, kecuali ....
    a. cara kepemimpinan
    b. belajar bergaul dengan banyak orang
    c. cara mengeluarkan pendapat dengan benar
    d. belajar untuk mendapatkan keuntungan banyak

37. Maksud dari keputusan bersama adalah ....
    a. hasil perselisihan masyarakat
    b. hasil kompromi dari hal-hal yang harus diputuskan oleh wakil-wakil masyarakat
    c. kerjasama di antara banyak pihak bagi kepentingan umu,
    d. keinginan untuk mencari dan mengumpulkan informasi

38. Keputusan bersama memiliki tujuan agar ....
    a. masyarakat merasakan keadilan
    b. tercipta rasa aman dan kesejahteraan
    c. masyarakat merasakan ketentraman dan ketertiban
    d. tercipta rasa kasih sayang dan saling memiliki

39. Berikut ini adalah sikap di dalam mematuhi keputusan bersama, kecuali ....
    a. bersikap taat, artinya segala keputusan bersama itu dipatuhi dengan baik apapun konsekuensinya.
    b. bersikap tenggang rasa, setiap orang memiliki cara yang berbeda di dalam melaksanakan hasil keputusan bersama itu. kamu harus bisa bertenggang rasa dengan adanya perbedaan tersebut.
    c. bersikap teliti, semua keputusan yang diambil seharusnya dapat menguntungkan semua pihak di dalam organisasi
    d. bersikap menghargai, karena proses untuk menghasilkan keputusan bersama melalui waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak sudah semestinya kita menghargai keputusan bersama itu.

40. Di sekolahmu ada seorang guru wali kelas yang menjadi favorit seluruh siswa, namun ketika ada pemilihan guru berdedikasi yang dilakukan di sekolah, dia dikalahkan oleh guru yang terkenal galak. Padahal hasil tersebut didapatkan melalui penghitungan suara terbanyak dari pihak guru, murid dan staf sekolah. Maka sikapmu adalah ....
    a. tidak setuju, kamu merasa pasti ada yang curang dalam penghitungan suara
    b. ragu-ragu, mungkin ada yang kurang mengerti tata cara penghitungan suara sehingga guru favorit siswa menjadi terkalahkan
    c. sangat setuju, semuanya pasti ada alasannya. mungkin guru berdedikasi dan guru favorit berbeda pengertian
    d. setuju, jika hasil didapatkan dari penghitungan suara maka hasil tersebut dapat dihitung ulang untuk mendapatkan hasil yang valid (terpercaya)

## B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Negara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan dasar negara. Sebelumnya di era BPUPKI telah dimulai beberapa sidang yang membahas hal ini. Sebutkan!
2. BPUPKI diresmikan oleh Jepang pada tanggal 28 Mei 1945. Ada beberapa orang anggota BPUPKI pertama yang berjumlah 63 orang yang juga masuk ke dalam keanggotaan panitia sembilan. Sebutkan nama kesembilan anggota tersebut!
3. Siapakah yang pertama kali mempopulerkan nama Pancasila? Jelaskan!
4. Jelaskan perbedaan antara Piagam Jakarta dan Pancasila!
5. Jelaskan mengenai Undang-undang Dasar 1945 yang kamu ketahui!
6. Jelaskan mengenai negara kesatuan Republik Indonesia!
7. Sebutkan beberapa contoh ancaman terhadap keutuhan negara dan upaya kamu untuk mengatasi hal tersebut!
8. Perilaku seperti apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa?
9. Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Dan jelaskan beberapa manfaatnya!
10. Sebutkan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan jelaskan!
11. Berikan contoh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat!
12. Berikan contoh peraturan perundang-undangan di tingkat daerah!
13. Apakah yang dimaksud dengan organisasi?
14. Sebutkan dasar hukum mengenai organisasi di Indonesia!
15. Sebutkan beberapa contoh organisasi yang berada di lingkungan sekolahmu!
16. Sebutkan beberapa contoh organisasi di lingkungan masyarakat, jelaskan!
17. Sebutkan pengertian dari keputusan bersama yang kamu ketahui!
18. Berikan contoh bentuk-bentuk keputusan bersama!
19. Jelaskan mengenai tujuan keputusan bersama!
20. Sebutkan sikap-sikap di dalam mematuhi keputusan bersama!

## C. Isilah titik-titik di bawah ini!

1. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diresmikan pada tanggal ... ditugaskan untuk ... Badan ini semula terdiri atas ... anggota.
2. Beberapa orang anggota mengajukan usul mengenai dasar negara yaitu ... , ... , dan ....
3. Panitia Perancang Undang-undang Dasar dibentuk pada tanggal ... dan beranggotakan ....
4. Dasar negara Republik Indonesia adalah ... dan ... yang telah di-amandemen sebanyak ....
5. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki ....
6. Perbedaan antara negara kesatuan dengan negara federal yaitu ....
7. Batas laut kontinen sebuah negara diukur dari jarak paling jauh .... dari garis dasar ke laut bebas. Dengan kedalaman tidak lebih dari ... meter.
8. Ancaman terhadap keutuhan negara bisa datang dari ... dan dari ... contohnya ....
9. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah ... yang bertugas ... dari ancaman ....
10. Cara menghormati dan menghargai perbedaan dengan ... karena ... dan ....
11. Peraturan perundang-undangan adalah ... dan peraturan ini dibuat oleh ... dan ... jenis.
12. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk ... dan agar kehidupan ... sehingga tidak ada ....
13. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut ... yaitu UUD 1945, UU, ..., Peraturan ..., Peraturan ..., Peraturan ....
14. UU Republik Indonesia No ... tahun ... tentang perubahan UU No. 21 Tahun 1997 mengenai .... yang berisi kewajiban para wajib pajak tanpa perlu menunggu surat ketetapan pajak terlebih dulu.
15. Organisasi yang dalam bahasa Yunani berarti ... , ... berarti ....
16. Organisasi memiliki satu ... dan ... yang sama.
17. Pasa ..., “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan ... ” Yang berarti semua warga negara dijamin untuk mendirikan ... Selama organisasi itu memiliki manfaat bersama dan tidak bertentangan dengan dasar negara, ....

18. Manfaat yang bisa didapatkan jika kamu bergabung dengan organisasi adalah ..., ..., dan ..., ... tapi perlu pula diperhatikan agar organisasi tersebut sesuai dengan ..., ... dan minatmu.
19. Keputusan bersama dihasilkan melalui ... yang dikenal masyarakat. Dan dibuat agar ... atau ... di dalam menyelesaikan ....
20. Di dalam proses pengambilan keputusan bersama itu, setiap pihak diharapkan memiliki ... dari pihak lain, bertenggang rasa atau ..., ... atau mau menang sendiri, dan menyampaikan ... dengan sopan dan berperilaku ..., serta selalu menghormati semua pihak.

## Tugas Mandiri

1. Buatlah kliping mengenai kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kamu bisa mencarinya dari media massa atau internet. Jangan lupa sertakan gambar
2. Tuliskan di selembar kertas folio atau A4 mengenai contoh peraturan perundang-undangan di Indonesia di tingkat daerah dan pusat. Dan manfaat apa yang bisa didapatkan dari peraturan-peraturan tersebut. Misalnya peraturan mengenai K3 (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan) yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, manfaatnya untuk masyarakat agar kehidupan masyarakat teratur, tidak mudah terkena penyakit epidemik dan sebagainya
3. Apakah kamu termasuk salah satu anggota organisasi sekolah? Jika ya, buatlah satu karangan singkat mengenai data organisasi tersebut. Misalnya didirikan tahun, berapa banyak anggota yang bergabung sekarang, apa visi dan misi didirikannya organisasi tersebut. Jika mau, kamu pun bisa menyertakan foto-foto kegiatan organisasi yang kamu ikuti tersebut
4. Carilah beberapa contoh bentuk kesepakatan bersama di luar negeri dan di dalam negeri. Masing-masing tiga. Buatlah seperti kliping dan disertai dengan foto. Selamat bekerja.

# Glosarium

| | | |
|---|---|---|
| Administrasi | : | kegiatan dalam usaha yang mencakup penetapan tujuan dan penyelenggaraan pembinaan organisasi |
| Amandemen | : | penambahan atau perubahan pada bagian dokumen seperti UU |
| Dialog | : | percakapan |
| Ekstra kulikuler | : | kegiatan di luar jadwal resmi sekolah atau di luar kegiatan belajar mengajar |
| Hukum internasional | : | aturan yang telah disepakati bersama yang mengikat seluruh negara di dunia |
| Jalur diplomatik | : | cara yang dipakai untuk memperjuangkan apa yang dimiliki atau diinginkan suatu negara melalui jalan damai, perundingan |
| Karakter | : | sifat, pembawaan manusia |
| Kokulikuler | : | kegiatan di sekolah yang telah terjadwal, kegiatan belajar mengajar |
| Komite Sekolah | : | dewan sekolah yang dipilih atau diwakili oleh orangtua siswa |
| Kompromi | : | persetujuan dengan jalan damai dengan cara mengurangi tuntutan |
| Konflik | : | perselisihan, pertentangan |
| Konsekuensi | : | akibat dari suatu hal |
| Majemuk | : | terjadi dari beberapa bagian yang merupakan kesatuan |
| Misi | : | upaya yang dilakukan untuk meraih tujuan |
| Mufakat | : | persetujuan, kesepakatan |
| Musyawarah | : | proses berembuk, berunding menentukan sesuatu |
| Negara kesatuan | : | negara yang berbentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan pusat |
| Reses | : | masa damai atau istirahat yang diperuntukkan bagi anggota dewan (dalam hal ini sidang BPUPKI) |
| Separatisme | : | faham untuk yang memisahkan diri atau memerdekakan diri dari negara atau pusat kekuasaan |
| Struktur | : | bagian, biasanya berjenjang ke atas dan ke bawah |
| Tatanan | : | aturan, susunan, garis-garis perilaku kehidupan |
| Tenggang rasa | : | dapat menghargai atau menghormati perasaan orang lain |
| Toleransi | : | saling menghargai dan menghormati |
| Visi | : | kemampuan untuk melihat ke depan, cita-cita di masa depan |
| Voting | : | pemungutan suara |

# Indeks


A

adil 4, 7, 12, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 54, 65, 72
agama 16, 18, 22, 23, 24, 26, 30, 54, 60
aman 34, 36, 37, 67
amandemen 8, 34, 38, 51, 59
anggota 3, 4, 5, 6, 8, 40, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 77
astronomi 14, 26, 27, 29
aturan 8, 34, 36, 51

B

bangsa 2, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 30, 38, 40, 54, 60, 62, 76, 77, 80
beragam 10, 16, 18, 54, 70
bersama 8, 10, 15, 21, 25, 30, 34, 35, 38, 39, 54, 59, 63, 64, 66, 67, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

D

dasar 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 28, 37, 38, 47, 48, 49, 53, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 76
diplomatik 11, 16, 54

H

hak 9, 15, 36, 48, 49, 50, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 70, 72, 73, 77
hukum 3, 8, 9, 11, 12, 18, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 59, 60, 69, 7

I

Indonesia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 80, 81

K

kebebasan 59, 60, 69, 71
kemerdekaan 2, 7, 10, 17, 23, 60, 61, 65, 70
kepemimpinan 59, 66, 70, 71, 96
kepentingan 12, 15, 40, 49, 54, 59, 60, 76
keputusan 23, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
kesatuan 2, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 53, 54, 56, 66, 76
keutuhan 2, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 54, 56
kewajiban 7, 29, 36, 37, 41, 43, 48, 51, 55, 58, 62, 72, 73

L

lembaga 9, 11, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 48, 50, 54, 58, 78
lingkungan 22, 29, 51, 58, 60, 62, 65, 66, 57, 68, 70, 72, 78, 79

M

masyarakat 6, 10, 11, 12, 16, 19, 21,

23, 27, 31, 34, 36, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80
musyawarah 4, 76, 77, 78

N

negara 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 73, 76, 77, 79
norma 60

O

organisasi 10, 22, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77

P

pancasila 7, 8, 20, 26, 28, 37, 48, 59, 76
pejuang 7, 10
pemerintah 2, 6, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 39, 43, 45, 50, 51, 54, 58, 60, 61, 65, 69, 70, 71, 77
peraturan 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 70, 71, 78
perbedaan 16, 17, 18, 21, 22, 26, 47, 59, 62, 76, 77, 79, 80
persatuan 4, 9, 10, 12, 17, 18, 22, 26, 28, 54, 58, 63, 76, 80

R

rakyat 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 22, 30, 34, 78, 83, 84, 11, 66, 78, 80
republik 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 41, 46, 48, 51, 55, 56, 59, 66, 68, 71
rukun 33, 57, 75

S

sanksi 42, 43, 63, 70, 79
sarana 62, 63, 71
sekolah 22, 36, 42, 43, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79
sopan 24, 77
sosial 5, 8, 12, 23, 58, 62, 65, 70, 72
struktur 58, 62, 70, 71
subur 15

T

tertib 34, 36, 59, 62, 63, 79

U

undang-undang 6, 7, 8, 20, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 46, 60
undang-undang 34, 35, 38, 39, 50, 51, 59, 70

W

warga 3, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 60, 61, 65, 71, 73, 79
wilayah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 65

# Daftar Pustaka


Chaniago, Amran Y.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1984. *Pedoman Metode penyajian Pendidikan Moral Pancasila dan Penerapapannya.*

Ningsih, Rini. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 5 SD*. Jakarta: Yudhistira, 2006.

Piagam Jakarta, *Undang-undang Dasar 45 Beserta Penjelasannya*. Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2002.

Setijo, Pandji. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Sujiyanto, Drs, Muhlisin, S.Pd dan Dra Cahyaningsih. *Kewarganegaraan*. Bandung: Ganeca Exact, 2005.

Tim Redaksi Pusat Bahasa. *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005.

Tim Yayasan Pendidikan Haster. *Ikhtisar Materi-materi Penting Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMU*. Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000.

Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Widodo H, Teddy dan Yoyok Prasetyo. *Rangkuman Pengetahuan Umum Sekolah Dasar*. Surabaya: Penerbit Lima Bintang, 2003.

Chaniago, Amran Y.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

1993. *Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) PPKN SD Jakarta.*

1993. *Materi Latihan Kerja Guru Pendidikan Moral Pancasila Sekolah Dasar Jakarta.*

1994. *Pedoman Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Dasar kelas 5 Jakarta.*

**Internet**

www.google.com//web
www.google.com//images
www.tokoh-indonesia.com
www.kompas.com
www.pikiran-rakyat.com
www..wikipedia.id. org

ISBN 978-979-068-625-0 (nomor jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-628-1

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 Tanggal 7 November 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp8.096,-